**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Informasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 63 disebutkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kehutanan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan, selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas, Bidang Pemanfaatan Hutan, Planologi Kehutanan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah :

**’’Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat’’**

Untuk mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya.
2. Meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan
   1. **Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas KehutananProvinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

* menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
* menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
* menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
* menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
* menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
* menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

* Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
* Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
* Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.
  1. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Informasi Umum
  2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

* 1. Ekonomi Makro
  2. Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

* 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah

Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

* 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang

Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungandengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Bab VII PENUTUP

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

* 1. **Ekonomi Makro**

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2017, tujuan pembangunan di bidang kehutanan yang ingin dicapai dalam tahun 2017 adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, mempercepat penurunan angka kemiskinan serta memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2017 yang juga merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkurangnya tekanan kerusakan hutan melalui konservasi dan perlindungan sumber daya hutan guna menunjang adaptasi perubahan iklim, perbaikan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat dan perencanaan dan pengembangan kehutanan yang dinamis, terarah dan terpadu di provinsi Sumatera Barat.

* 1. **Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

* + 1. **Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang pendapatan dalam tahun 2017 digariskan sebagai berikut :

* Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem pendapatan.
* Peningkatan pendapatan melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi.

**2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

* + Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran
* Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
* Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja
  1. **Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2017, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 14 program adalah sebagai berikut :

* 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target kinerja :
* Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian kinerjanya yaitu tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listik, air dan internet selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan selama 1 tahun.
* Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan Dan Sopir Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor, capaian kinerjanya yaitu tersedianya alat-alat tulis kantor selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan dan penggandaan untuk Dinas dan UPTD selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerjanya yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, capaian kinerjanya yaitu tersedianya bahan bacaan surat kabar dan warta perundang-undangan selama 1 tahun dan penyediaan buku pustaka sebanyak 20 buku.
* Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun.
* Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah, capaian kinerjanya yaitu terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi selama 1 tahun.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur: instruktur senam, pembaca Al-Quran dan Ustad selama 1 tahun.
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target kinerja :
* Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembangunan gedung tempat parkir.
* Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 3 unit dan pengadaan kendaraan bermotor roda dua trail sebanyak 1 (satu) unit.
* Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor, capaian kinerjanya yaituterpenuhinya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor berupa pengadaan spanduk, bendera tiang, gorden, pengadaan tiang bendera untuk UPTD KPHL Bukit Barisan sebanyak 9 paket, pengadaan plang nama untuk cabang dinas/UPTD sebanyak 9 paket.
* Kegiatan Pengadaan Mebeleur, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya penyediaan meubelair berupa rak arsip sebanyak 2 (dua) set dan meja tulis sebanyak 6 (enam) set.
* Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerjanya yaitu terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor berupa pengadaan AC split cabang dinas sebanyak 5 (lima) unit, komputer sebanyak 5 (lima) unit dan pengadaan printer sebanyak 4 (empat) unit, meja kerja eselon IV sebanyak 2 set dan pengadaan kursi kerja eselon IV sebanyak 5 set.
* Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess, capaian kinerjanya terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sebanyak 11 (sebelas) unit selama 1 tahun.
* Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, capaian kinerjanya terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 5 (lima) unit.
* Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerjanya terlakasananya pemeliharaan kendaraan operasional selama 1 tahun.
* Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor, capaian kinerjanya terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor sebanyak 287 unit, yaitu pemeliharaan AC sebanyak 50 unit, pemeliharaan mesin tik sebanyak 25 unit, pemeliharaan telpon sebanyak 20 unit, pemeliharaan kamera sebanyak 15 unit, pemeliharaan sound system sebanyak 11 unit, pemeliharaan GPS sebanyak 20 unit, pemeliharaan handycam sebanyak 6 unit, pemeliharaan genset sebanyak 5 unit, pemeliharaan komputer sebanyak 40 unit, pemeliharaan laptop sebanyak 50 unit, pemeliharaan printer sebanyak 40 unit dan pemeliharaan plotter sebanyak 5 unit selama 1 tahun.
* Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Dan Jaringan, capaian kinerjanya Terlaksananya pemeliharaan instalasi air rumah dinas dan pemeliharaan instalasi air gedung II dan UPTD selama 1 tahun.
  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan target kinerja:
* Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNSD dan PTT beserta kelengkapannya sebanyak 573 stel.
  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target kinerja:
* Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 15 kali selama 1 tahun.
  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan target kinerja :
* Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian kinerjanya yaitu Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LKj, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan.
* Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, capaian kinerjanya Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran selama 12 bulan dan tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada Dinas Kehutanan 100%
  1. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset, dengan target kinerja :
* Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, capaian kinerjanya yaitu tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renstra dan RPHJP KPH dan tercapainya tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset.
* Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
* Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset
  1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan target kinerja:
* Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan, capaian kinerjanya yaituTerpeliharanya batas kawasan hutan 70 km, persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya 100%.
* Kegiatan Kajian Perubahan Fungsi Dan Peruntukkan Kawasan Hutan, capaian kinerjanya yaitu Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawsan hutan dalam RTRW provinsi Sumatera Barat dan persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya sebesar 100%.
* Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, capaian kinerjanya yaituTerpantau termonitornya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya untuk 13 kab/kota/1 laporan, persentase pemanfaatan dan penggunaan kawsan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya sebesar 100%.
* Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen, capaian kinerjanya yaitu Tersedianya data potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu sebagai data penghitungan carbon stock sebanyak 43 petak.
  1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan target kinerja :
* Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan, capaian kinerjanya yaituTerlaksananya musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota sebanyak 2 laporan dan persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan 8,5%.
* Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan, capaian kinerjanya yaituTerlaksananya penigkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola Hn, HKm, HTR dan HR kemitraan sebanyak 120 orang.
* Kegiatan Penyiapan, Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan, capaian kinerjanya yaitu Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan(HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan) sebanyak 40 kelompok.
* Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Dan Penguatan Kelembagan Tani Hutan, capaian kinerjanya yaitu Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kahutanan di Sumatera Barat sebanyak 94 orang.
* Kegiatan Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat, capaian kinerjanya yaituterjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (Hn, HKm, HTR dan HR kemitraan).
* Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove, capaian kinerjanya yaitu Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola mangrove sebanyak 30 orang.
  1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan target kinerja :
* Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), capaian kinerjanya yaitu Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan produksihasil hutan, iuran kehutanan dan penggunaan peralatan IUPHHK hutan alam sebanyak 3 laporan.
* Kegiatan Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, capaian kinerjanya yaitu Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan pengendalian peredaran hasil hutan sebanyak 1 laporan, persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebesar 81%.
* Kegiatan Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman, capaian kinerjanya yaitu Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan, penatausahaan produksi hasil hutan olahan, realisasi pemenuhan hutan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman sebanyak 3 laporan.
* Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), capaian kinerjanya yaitu Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan pengendalian produksi HHBK sebanyak 1 laporan.
* Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH), capaian kinerjanya yaitu Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan sebanyak 10 kelompok/30 orang.
* Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan,capaian kinerjanya yaitu Termanfaatkannya dan berkembangnya hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan diwilayah KPH sebanyak 10 lokasi/1 dokumen.
* Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan, capaian kinerjanya yaitu Tersedianya data jasa lingkungan wisata alam diwilayah KPH sebanyak 1 laporan.
  1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan target kinerja:
* Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan, capaian kinerjanya yaitu Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas sebanyak 250.000 batang/10 unit/3 sertifikat pada 15 kab/kota dan pengadan rak bibit persemaian UPTD BPTH sepanjang 1.000 meter.
* Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan, capaian kinerja yaitu Tersedianya data produksi, peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan RHL beserta pembangunan hutan tanaman, terbentuknya pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik, tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan untuk 13 kabupaten/kota.
* Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik, capaian kinerja yaitu Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan pada 4 lokasi, persentase penurunan luas lahan kritis 0,42%
  1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH, dengan target kinerja
* Kegiatan Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan pada 13 kabupaten/kota.
* Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, capaian kinerjanya yaitu Terlaksananya pengumpulan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan (PEP) RAD-GRK sektor berbasis lahan kehutanan.
* Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, capaian kinerjanya yaitu Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan.
* Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, capaian kinerjanya yaitu Terlaksananya psikotest, operasi intelijen, operasi prefesit/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (Liphut) dan koordinasi.
* Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam Di Wilayah Kelola KPH, capaian kinerjanya yaitu Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data jenis satwa dan tumbuhan liar di kawsan hutan wilayah kelola KPH sebanyak 10 dokumen, persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebesar 100%.
* Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, capaian kinerja yaitu Terlaksananya pelatihan dan penguatan kelembagaan PPHBN.
* Kegiatan Identifikasi Dan Invetarisasi Serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial Dan Daerah Penyanggah, capaian kinerjanya yaitu Terbentuknya dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 lokasi.
* Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial Dan Daerah Penyangga, capaian kinerjanya yaitu Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat.
  1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan target kinerja :
* Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan, capaian kinerjanya yaituTersusunnya data dan informasi kehutanan, peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan sebesar 100%.
* Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP, capaian kinerjanya yaituTerlaksananya sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan operasional SPIP sebanyak 4 laporan.
  1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan target kinerja :
* Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah, capaian kinerjanya yaituTerbangunnya bangunan konservasi tanah sebanyak 2 (dua) unit.
* Kegiatan Monitoring Dan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, capaian kinerjanya yaituTerlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh kabupaten/kota pada 10 kabupaten/kota.
* Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Derah Aliran Sungai, capaian kinerjanya yaitu Tersusunnya rencana pengelolaan DAS sebanyak 1 dokumen.
* Kegiatan Inventarisasi Dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH, capaian kinerjanya Tersedianya data lahan kritis di wilayah KPH sebanyak 1 judul.
  1. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan target kinerja :
* Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, capaian kinerjanya yaitu Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis kelompok masyarakat peduli api (MPA), persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) sebesar 10%.

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2017, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 40,261,000.00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 82,748,207,165.00 direncanakan untuk membiayai :

* Belanja Pegawai Rp. 44,982,578,176.00
* Belanja Barang dan Jasa Rp.26,911,382.989.00
* Belanja Modal senilai Rp.10,854,246,000.00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

**3.1.1. Pendapatan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 42,359,746.00 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas) sebesar Rp 42,359,746.00

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2017 jika dibanding dengan anggaran tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **PENDAPATAN** | **ANGGARAN(Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **%** | **LEBIH/KURANG** |
| I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 40,261,000.00 | 42,359,746.00 | 105.21 | 2,098,746.00 |
| 1 | Pendapatan Pajak  Daerah | - | - |  | - |
| 2 | Pendapatan Retribusi  Daerah | 40,261,000.00 | 42,359,746.00 | 105.21 | 2,098,746.00 |
| 3 | Pendapatan Hasil  Peng. Kekayaan  Daerah yg Dipisahkan | - | - | - | - |
| 4 | Lain-lain PAD yang  Sah | - | - | - | - |

Pada tabel di atas terlihat jumlah realisasi melebihi dari anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp 42.359.746.00 (105.21%) atau lebih besar sebesar Rp 2.098.746,-(5.21%),- dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

* + 1. **Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **URAIAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **LEBIH/KURANG** |
| B | BELANJA-LRA | 82,748,207,165.00 | 60.312.061.080,00 | 72.89% | 24.150.344.226,00 |
| I | BELANJA OPERASI | 71,893,961,165.00 | 58.487.182.580,00 | 81.35% | 18.634.962.751,00 |
| 1 | Belanja Pegawai | 44,982,578,176.00 | 41.884.620.624,00 | 93.11% | 3.097.957.552,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26,911,382,989.00 | 16.602.561.956,00 | 61.69% | 10.308.821.033,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| II | BELANJA MODAL | 10,854,246,000.00 | 1.824.878.500,00 | 16.81% | 9.029.367.500,00 |
| 1 | Belanja Tanah | - | - | - | - |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 9,678,146,000.00 | 1.563.605.500,00 | 16.16% | 8.114.540.500,00 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 266,500,000.00 | 261.273.000,00 | 98.04% | 5.227.000,00 |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - | - |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 909,600,000.00 | - | - | 909,600,000.00 |

Seluruh realisasi belanja setelah konversi pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setelah perubahan sebesar Rp.60.312.061.080,00 dengan persentase sebesar 72.89% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang terdiri dari 14 program mencapai realisasi kinerja secara keseluruhan sebesar Rp 18.427.440.456,00 (48.79%).

Ikhtisar pencapaian realisasi keuangan menurut program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan total anggaran Rp3.180.720.360,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp2.682.320.360,- dengan realisasi sebesar Rp 2.166.554.034,- (80.77%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
   * Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil : Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pagu dana : Rp 100.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 76.314.150 ,- (76.31%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 1.000.000,00,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 527.500.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 293.410.941,- (55.62%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp234.089.059,- merupakan anggaran sisa mati.

* + Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Hasil : Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan. Pagu dana : Rp 15.400.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 1.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 989.323,- (98.93%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Hasil : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor selama 1 tahun. Pagu dana: Rp 1.055.920.360,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 980.140.241,- (92.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil : Terpenuhinya penyediaan alat-alat tulis perkantoran selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 125.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 124.919,000,- (99.94%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Hasil : Terpenuhinya penyediaan barang-barang cetakan dan fotocopy selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 120.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 120.000.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Terpenuhinya barang-barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun. Pagu dana : Rp62.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 62.000.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 41.400.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 10.704.000,- (25.86%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penyediaan Makanan dan Minuman

Hasil : Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 75.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 52.034.000,- (69.38%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Hasil : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 551.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 423.542.379,- (76.87%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 127.457.621 ,- merupakan anggaran sisa mati.

* + Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Hasil : Terpenuhinya jasa dokumentasi dan publikasi selama 1 tahun. Pagu dana Rp 20.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp8.500.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 8.500.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 90%.

* + Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Hasil : Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur. Pagu dana : Rp15.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp14.000.000,- (93.33%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan total anggaran Rp 1.100.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp2.575.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.250.304.052,- (87.37%).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:

* Pembangunan Gedung Kantor

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung tempat parkir

Pagu dana : Rp 199.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 194.745.000,- (97.86%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 3 unit dan pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) trail sebanyak 1 unit.

Pagu dana : Rp 1.276.500.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 1.225.708.500,- (96.02%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil: Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor berupa pengadaanspanduk, bendera tiang, gorden, tiang bendera untuk UPTD KPHL Bukit Barisan sebanyak 9 paket dan pengadaan plang nama cabang dinas/UPTD masing-masing sebanyak 9 paket. Pagu dana: Rp 100.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 97.888.000,- (97.89%) dan relisasi fisik sebesar 100%

* Pengadaan Meubelier

Hasil : Terlaksananya penyediaan meubelair berupa rak arsip sebanyak 2 (dua) set, meja tulis sebanyak 6 (enam) set. Pagu dana: Rp 50.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp34.500.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 34.331.000,- (99.51%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor berupa pengadaan AC split cabang dinas sebanyak 5 (lima) unit, komputer sebanyak 5 (lima) unit dan pengadaan printer sebanyak 4 (empat) unit, meja kerja eselon IV sebanyak 2 set dan pengadaan kursi kerja eselon IV sebanyak 5 set. Pagu dana : Rp 100.000.000 dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp115.500.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp114.566.000,- (99.19%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinass/Mess

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sebanyak 11 (sebelas) unit selama 1 tahun. Pagu Dana : Rp 75.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp74.708.000,- (99.61%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 5 (lima) unit. Pagu dana : Rp 100.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 99.821.000,- (99.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 415.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 292.034.552,- (70.37%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 122.965.448,- merupakan anggaran sisa mati karena adanya penghematan.

* + Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor sebanyak 287 unit, yaitu pemeliharaan Ac sebanyak 50 unit, pemeliharaan mesin tik sebanyak 25 unit, pemeliharaan telpon sebanyak 20 unit, pemeliharaan kamera sebanyak 15 unit, pemeliharaan sound system sebanyak 11 unit, pemeliharaan GPS sebanyak 20 unit, pemeliharaan handycam sebanyak 6 unit, pemeliharaan genset sebanyak 5 unit, pemeliharaan komputer sebanyak 40 unit, pemeliharaan laptop sebanyak 50 unit, pemeliharaan printer sebanyak 40 unit dan pemeliharaan plotter sebanyak 5 unit selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 200.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 56.630.000,- (28.32%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan instalasi air dan saluran air rumah dinas kantor selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 60.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 59.872.000,- (99.79%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan total anggaran Rp309.420.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 264.069.000,- (85.34%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini :
   * Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Hasil : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNSD dan PTT beserta kelengkapannya sebanyak 573 stel. Pagu dana : Rp.309.420.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 264.069.000,- (85.34%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan total anggaran Rp 155.251.640,- dana dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 229.075.240,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 110.475.400,- (48.23%) serta realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini :
   * Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 15 kali selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 155.251.640,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 229.075.240,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 110.475.400,- (48.23%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan total anggaran Rp 699.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 412.580.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 407.619.950,- (98.80%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
   * Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Hasil : Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan , LKj, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan. Pagu dana : Rp 65.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 74.880.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 73.181.350,- (97.73%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Penatausahaan Keuangan SKPD

Hasil : Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran selama 12 bulan dan tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebesar sebesar 100%. Pagu dana : Rp 634.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 337.700.000 ,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 334.438.600,- (99.03%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset, dengan total anggaran Rp 1.383.828.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 1.347.674.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.023.329.650,- (75.93%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu :

* Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Hasil : Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renstra dan RPHJP KPH dan tercapainya tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset.Pagu dana : Rp 830.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 815.366.000 ,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 619.559.300,- (75.99%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Hasil : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Pagu dana : Rp300.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 278.480.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 224.094.250,- (80.47%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Hasil : Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset. Pagu dana:Rp.253.828.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp,- (%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan total anggaran Rp 1.137.521.925,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 1.120.499.925,-,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp,- (%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
   * Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

Hasil : Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawsan hutan dalam RTRW provinsi Sumatera Barat. Pagu dana : Rp 188.459.150,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 177.539.150,- ,-dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 167.665.400,- (94.44%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Kajian Perubahan Fungsi Dan Peruntukkan Kawasan Hutan.

Hasil : Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawsan hutan dalam RTRW provinsi Sumatera Barat. Pagu dana : Rp 204.824.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 198.722.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 163.771.900,- (82.41%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Hasil : Terpantau termonitornya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya pada 13 kab/kota/1 laporan. Pagu dana : Rp 166.167.825,- dan dana setelah perubahn anggaran Rp165.167.825,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 131.408.700,- (79.56%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen

Hasil : Tersedianya data potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu sebagai data penghitungan carbon stock sebanyak 43 petak. Pagu dana : Rp579.070.950,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 440.372.500,- (76.05%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan total anggaran Rp1.998.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp1.996.171.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp,- (%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
   * Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan

Hasil : Terlaksananya musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota sebanyak 2 laporan. Pagu dana : Rp 118.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp116.171.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 100.281.550,- (86.32%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan

Hasil : Terlaksananya penigkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola Hn, HKm, HTR dan HR kemitraan sebanyak 120 orang. Pagu dana: Rp.300.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 289.641.600,- (96.55%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Penyiapan, Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan.

Hasil : Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan) sebanyak 40 kelompok. Pagu dana : Rp1.050.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 845.614.400,- (80.53%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Dan Penguatan Kelembagan Tani Hutan.

Hasil : Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kahutanan di Sumatera Barat sebanyak 94 orang. Pagu dana : Rp 380.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 350.269.450,- (92.18%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Penguatan Forum Komunikasi PengelolaanHutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat.

Hasil : Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (Hn, HKm, HTR dan HR kemitraan). Pagu dana : Rp100.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 90.820.600,- (90.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove.

Hasil : Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola mangrove sebanyak 30 orang. Pagu dana : Rp 50.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 47.823.500,- (95.65%) dan realisasi fisik sebesar 100%

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan total anggaran sebesar Rp 2.135.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.683.130.500,- dengan realisasi sebesar Rp 1.336.916.104,- (79.43%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
   * Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan produksihasil hutan,iuran kehutanan dan penggunaan peralatan IUPHHK hutan alam sebanyak 3 laporan. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 75.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 89.288.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 82.225.850 ,- (92.09%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan pengendalian peredaran hasil hutan sebanyak 1 laporan.

Pagu Dana : Rp 75.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 63.068.800,- (84.00%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman.

Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan, penatausahaan produksi hasil hutan olahan, realisasi pemenuhan hutan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman sebanyak 3 laporan. Pagu Dana : Rp 150.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 141.279.000,- (94.19%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan pengendalian produksi HHBK sebanyak 1 laporan. Pagu Dana : Rp 150.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 133.951.300,- (89.30%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH).

Hasil : Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan sebanyak 10 kelompok/30 orang.Pagu Dana : Rp 150.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 125.579.200,- (83.72%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Hasil : Termanfaatkannya dan berkembangnya hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan diwilayah KPH sebanyak 10 lokasi/1 dokumen.Pagu Dana : Rp 1.210.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp878.342.500,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 646.350.254,- (73.59%) dan realisasi fisik sebesar 94.51%

* + Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Hasil : Tersedianya data jasa lingkungan wisata alam diwilayah KPH sebanyak 1 laporan.Pagu Dana : Rp 325.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 190.500.000,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 144.61.700,- (75.83%) dan realisasi fisik sebesar 93.56%

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan total anggaran Rp1.885.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp4.385.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.816.752.700,- (41.43%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
   * Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.

Hasil : Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas sebanyak 250.000 batang/10 unit/3 sertifikat pada 15 kab/kota.Pagu dana :Rp 1.700.000.000,-dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp4.200.000.000,-.Realisasi keuangan sebesar Rp 1.683.361.300,- (39.37%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.

Hasil : Tersedianya data produksi, peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan RHL beserta pembangunan hutan tanaman, terbentuknya pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan,tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik,tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan 13 kabupaten/kota/1 dokumen laporan.Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 125.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 115.960.450,- (92.77%) dan realisasi fisik sebesar 94.77%.

* + Konservasi Sumber Daya Genetik.

Hasil:Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan pada 4 lokasi. Pagu Dana : Rp 60.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 47.430.950,- (79.05%) dan realisasi fisik sebesar 91%.

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH, dengan total anggaran sebesar Rp 5.316.241.064,-,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.588.806.064,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.788.509.698,- (35.78%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini :
   * Kegiatan Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan.

Hasil : Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan pada 13 kabupaten/kota. Pagu Dana : Rp 216.900.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 168.073.150,- (77.49%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

Hasil : Terlaksananya pengumpulan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan (PEP) RAD-GRK sektor berbasis lahan kehutanan. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 200.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 175.096.850,- (87.55%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

Hasil : Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan.

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp100.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp99.163.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp90.228.050,- (90.99%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

Hasil : Terlaksananya psikotest, operasi intelijen, operasi prefesit/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (Liphut) dan koordinasi.

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.848.041.064,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp8.148.041.064,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp1.599.037.748,- (19.62%) dan realisasi fisik sebesar 85%.

* + Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam Di Wilayah Kelola KPH.

Hasil : Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data jenis satwa dan tumbuhan liar di kawsan hutan wilayah kelola KPH sebanyak 10 dokumen.

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp500.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp474.000.000,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 410.288.250,- (86.56%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.

Hasil : Terlaksananya pelatihan dan penguatan kelembagaan PPHBN.

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp994.700.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp963.044.700,- (96.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Identifikasi Dan Invetarisasi Serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial Dan Daerah Penyanggah

Hasil : Terbentuknya dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 lokasi.

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp418.300.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp417.702.000,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp354.745.200,- (84.93%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial Dan Daerah Penyangga.

Hasil : Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp38.300.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 27.995.750,- (73.10%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran Rp500.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 488.769.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 356.968.250,- (73.03%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini :
   * Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan.

Hasil : Tersusunnya data dan informasi kehutanan.

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp250.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp249.270.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 202.546.750,- (81.26%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP.

Hasil : Terlaksananya sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan operasional SPIP sebanyak 4 laporan. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp250.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp239.499.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 154.421.500,- (64.48%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Program Rehablilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan total anggaran Rp1.795.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 1.576.036.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.223.005.768,- (77.60%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini :
   * Pengembangan Sarana Konservasi Tanah.

Hasil : Terbangunnya bangunan konservasi tanah sebanyak 2 (dua) unit. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp100.000.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 93.054.050,- (93.05%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Monitoring Dan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.

Hasil : Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh kabupaten/kota pada 10 kabupaten/kota.

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp370.000.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp348.338.150,- (94.15%) dan realisasi fisik sebesar 95%.

* + Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Derah Aliran Sungai.

Hasil : Tersusunnya rencana pengelolaan DAS sebanyak 1 dokumen.

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp200.000.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 167.932.268,- (83.97%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

* + Inventarisasi Dan Identifikasi Lahan Kritis Di Wilayah Kelola KPH.

Hasil : Tersedianya data lahan kritis di wilayah KPH 1 judul. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.125.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 906.036.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 613.681.300,- (67.73%) dan realisasi fisik sebesar 97.50%.

1. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan total anggaran Rp1.426.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp8.370.646.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.055.266.250,- (12.61%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini :
   * Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Hasil : Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis kelompok masyarakat peduli api (MPA). Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.426.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp8.370.646.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.055.266.250,- (12.61%) dan realisasi fisik sebesar 98%.

Daftar tabel Ikhtisar pencapaian realisasi keuangan menurut program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/Kegiatan | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Realisasi | |
| Rp | Rp | Rp | Fisik (%) | Keu (%) |
| A | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.180.720.360 | 2.682.320.360 | 2.166.554.034 | 100.00 | 80.77 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.000.000 | 100.000.000 | 76.314.150 | 100.00 | 76.31 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.000.000.000 | 527.500.000 | 293.410.941 | 100.00 | 55.62 |
| 3 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 15.400.000 | 1.000.000 | 989.323 | 100.00 | 98.93 |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | 1.055.920.360 | 1.055.920.360 | 980.140.241 | 100.00 | 92.82 |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 125.000.000 | 125.000.000 | 124.919.000 | 100.00 | 99.94 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 62.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 41.400.000 | 41.400.000 | 10.704.000 | 100.00 | 25,86 |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 75.000.000 | 75.000.000 | 52.034.000 | 100.00 | 69.38 |
| 10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 551.000.000 | 551.000.000 | 423.542.379 | 100.00 | 76.87 |
| 11 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | 20.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 100.00 | 93.33 |
| B | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.100.000.000 | 2.575.500.000 | 2.250.304.052 | 100.00 | 87.37 |
| 13 | Pembangunan Gedung Kantor | - | 199.000.000 | 194.745.000 | 100.00 | 97.86 |
| 14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | 1.276.500.000 | 1.225.708.500 | 100.00 | 96.02 |
| 15 | Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 | 97.888.000 | 100.00 | 97.89 |
| 16 | Pengadaan Mebeleur | 50.000.000 | 34.500.000 | 34.331.000 | 100.00 | 99.51 |
| 17 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.000.000 | 115.500.000 | 114.566.000 | 100.00 | 99.19 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas / Mess | 75.000.000 | 75.000.000 | 74.708.000 | 100.00 | 99.61 |
| 19 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.821.000 | 100.00 | 99.82 |
| 20 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 415.000.000 | 415.000.000 | 292.034.552 | 100.00 | 70.37 |
| 21 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor | 200.000.000 | 200.000.000 | 56.630.000 | 100.00 | 28.32 |
| 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.872.000 | 100.00 | 99.79 |
| C | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 309.420.000 | 309.420.000 | 264.069.000 | 100.00 | 85.34 |
| 23 | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya | 309.420.000 | 309.420.000 | 264.069.000 | 100.00 | 85.34 |
| D | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 155.251.640 | 229.075.240 | 110.475.400 | 100.00 | 48.23 |
| 24 | Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan | 155.251.640 | 229.075.240 | 110.475.400 | 100.00 | 48.23 |
| E | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 699.000.000 | 412.580.000 | 407.619.950 | 100.00 | 98.80 |
| 25 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 65.000.000 | 74.880.000 | 73.181.350 | 100.00 | 97.73 |
| 26 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 634.000.000 | 337.700.000 | 334.438.600 | 100.00 | 99.03 |
| F | Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset | 1.383.828.000 | 1.347.674.000 | 1.023.329.650 | 100.00 | 75.93 |
| 27 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 830.000.000 | 815.366.000 | 619.559.300 | 100.00 | 75.99 |
| 28 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | 300.000.000 | 278.480.000 | 224.094.250 | 100.00 | 80.47 |
| 29 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | 253.828.000 | 253.828.000 | 179.676.100 | 100.00 | 70.79 |
| G | Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan | 1.137.521.925 | 1.120.499.925 | 903.218.500 | 100.00 | 80.61 |
| 30 | Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan | 188.459.150 | 177.539.150 | 167.665.400 | 100,00 | 94.44 |
| 31 | Kajian Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan | 204.824.000 | 198.722.000 | 163.771.900 | 100.00 | 82.41 |
| 32 | Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan | 165.167.825 | 165.167.825 | 131.408.700 | 100.00 | 79.56 |
| 33 | Pembuatan Petak Ukur Permanen | 579.070.950 | 579.070.950 | 440.372.500 | 100.00 | 76.05 |
| H | Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan | 1.998.000.000 | 1.996.171.000 | 1.724.451.100 | 100.00 | 86.39 |
| 34 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaa Kehutanan | 118.000.000 | 116.171.000 | 100.281.550 | 100.00 | 86.32 |
| 35 | Peningkatan Papasitas SDM Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan | 300.000.000 | 300.000.000 | 289.641.600 | 100.00 | 96.55 |
| 36 | Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 845.614.400 | 100.00 | 80.53 |
| 37 | Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan | 380.000.000 | 380.000.000 | 350.269.450 | 100.00 | 92.18 |
| 38 | Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat | 100.000.000 | 100.000.000 | 90.820.600 | 100.00 | 90.82 |
| 39 | Pengembangan Hutan Mangrove | 50.000.000 | 50.000.000 | 47.823.500 | 100.00 | 95.65 |
| I | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | 2.135.000.000 | 1.683.130.500 | 1.336.916.104 | 96.41 | 79.43 |
| 40 | Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 75.000.000 | 89.288.000 | 82.225.850 | 100.00 | 92.09 |
| 41 | Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan | 75.000.000 | 75.000.000 | 63.068.800 | 100.00 | 84.09 |
| 42 | Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman | 150.000.000 | 150.000.000 | 141.279.000 | 100.00 | 94.19 |
| 43 | Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | 150.000.000 | 150.000.000 | 133.951.300 | 100.00 | 89.30 |
| 44 | Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) | 150.000.000 | 150.000.000 | 125.579.200 | 100.00 | 83.72 |
| 45 | Pemanfaatan Hutan Pada wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengeloaan Hutan | 1.210.000.000 | 878.342.500 | 646.350.254 | 94.51 | 73.59 |
| 46 | Pengelolaan potensi Hutan Pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan | 325.000.000 | 190.500.000 | 144.461.700 | 93.56 | 75.83 |
| J | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 1.885.000.000 | 4.385.000.000 | 1.816.752.700 | 100.00 | 41.43 |
| 47 | Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan | 1.700.000.000 | 4.200.000.000 | 1.653.361.300 | 100.00 | 39.37 |
| 48 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan | 125.000.000 | 125.000.000 | 115.960.450 | 94.77 | 92.77 |
| 49 | Konservasi Sumber Daya Genetik | 60.000.000 | 60.000.000 | 47.430.950 | 91.00 | 79.05 |
| K | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH | 5.316.241.064 | 10.588.806.064 | 3.788.509.698 | 88.46 | 35.78 |
| 50 | Pengendalian Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | 216.900.000 | 216.900.000 | 168.073.150 | 100.00 | 77.49 |
| 51 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 200.000.000 | 200.000.000 | 175.096.850 | 100.00 | 87.55 |
| 52 | Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan | 100.000.000 | 99.163.000 | 90.228.050 | 100,00 | 90.99 |
| 53 | Pengamanan dan Perlindungan Hutan | 2.848.041.064 | 8.148.041.064 | 1.599.037.748 | 85.00 | 19.62 |
| 54 | Perlindungan Dan Konservasi Alam Di Wilayah Kelola KPH | 500.000.000 | 474.000.000 | 410.288.250 | 100,00 | 86.56 |
| 55 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA | 994.700.000 | 994.700.000 | 963.044.700 | 100,00 | 96.82 |
| 56 | Identifikasi &Inventarisasi Serta Pengembg Kawasan Ekosistem Essensial& Daerah Penyanggah | 418.300.000 | 417.702.000 | 354.745.200 | 100,00 | 84.93 |
| 57 | Monitoring Evaluasi &Pembinaan Pengelolaan Ekosistim Essensial Dan Daerah Penyangga | 38.300.000 | 38.300.000 | 27.995.750 | 100,00 | 73.10 |
| L | Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup | 500.000.000 | 488.769.900 | 356.968.250 | 100,00 | 73.03 |
| 58 | Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan | 250.000.000 | 249.270.000 | 202.546.750 | 100,00 | 81.26 |
| 59 | Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP | 250.000.000 | 239.499.900 | 154.421.500 | 100,00 | 64.48 |
| M | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA | 1.795.000.000 | 1.576.036.000 | 1.223.005.768 | 97.39 | 77.60 |
| 60 | Pengembangan Sarana Konservasi Tanah | 100.000.000 | 100.000.000 | 93.054.050 | 100.00 | 93.05 |
| 61 | Monitoring & Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan | 370.000.000 | 370.000.000 | 348.338.150 | 95.00 | 94.15 |
| 62 | Pembinaan & Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 200.000.000 | 200.000.000 | 167.932.268 | 100.00 | 83.97 |
| 63 | Inventarisasi & Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH | 1.125.000.000 | 906.036.000.000 | 613.681.300 | 97.50 | 67.73 |
| N | Program Pengendalian Kebakaran Hutan | 1.426.000.000 | 8.370.646.000 | 1.055.266.250 | 100.00 | 12.61 |
| 64 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dan Lahan | 1.426.000.000 | 8.370.646.000 | 1.055.266.250 | 98.00 | 12.61 |
|  | **JUMLAH** | **23.020.982.989** | **37.765.628.989** | **18.427.440.456** | **48.79** |  |

Ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program:

* Program dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 program
* Program dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 1 program (rata-rata 98.80%).
* Program dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80% - 90%) sebanyak 5 program (rata-rata 84.09% ).
* Program dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%- 80%) sebanyak 4 program (76.49%)
* Program dengan kategori gagal (capaian kinerja 0%-60%) sebanyak 4 program (34.51%)

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan :

* Kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 3 kegiatan (rata-rata 100%)
* Kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 26 kegiatan (rata-rata 95.96%)
* Kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 13 kegiatan (rata-rata 84.38%).
* Kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%-80%) sebanyak 15 kegiatan (rata-rata 73.75%).
* Kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 7 kegiatan (rata-rata 32.80%)
  1. **Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan tidak ada, akan tetapi beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya pencapaian target adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Kurangnya Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota.
        2. Kurang sinkronnya penyusunan rencana waktu pelaksanaan kegiatan dan penarikan dan ketersediaan anggaran.
        3. Kurangnya jumlah, kapasitas dan kemampuan personil pelaksana kegiatan terutama program dan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat luas.
        4. Kurangnya sarana dan prasarana dan pembiayaan pendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Kehutanan.
        5. Belum optimalnya kelembagaan forum koordinasi serta peranserta Lembaga, instansi, LSM, kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemerhati lingkungan yang terkait dalam pembangunan kehutanan.

Beberapa kegiatan yang memiliki realisasi rendah dibawah 90%, penyebabnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Dana : Rp 100.000.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 76.314.150,- (76.31%)dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp23.685.850,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 3.300.000, belanja BBM/gas Rp 19.932.250, belanja paket/pengiriman Rp 120.000 dan honorarium pegawai honorer/tidak tetap Rp333.600. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu Dana : Rp 527.500.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 293.410.941,- (55.62%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp234.089.059,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja telepon Rp 21.245.503, belanja air Rp 23.304.550, belanja listrik Rp 140.603.981, belanja kawat/faksimili/internet/VPN Rp 48.935.025. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pagu Dana : Rp 41.400.000,dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 10.704.000,- (25,85%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp30.696.000,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja surat kabar/majalah Rp 21.096.000, belanja modal pengadaan buku umum Rp9.600.000.

Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Pagu Dana : Rp 75.000.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 52.034.000,- (69,38%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sisa dana sebesar Rp 22.966.000,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja makanan dan minuman rapat Rp 22.966.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Pagu Dana : Rp 551.000.000 dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 423.542.379,- (76,87%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp127.457.621, merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 14.785.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 67.395.552, belanja perjalanan dinas luar negeri Rp 45.277.069. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pagu Dana : Rp 415.000.000 dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 292.034.552,- (70,37%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sisa dana sebesar Rp 122.965.448,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja premi asuransi barang milik daerah Rp 1.901.400, belanja jasa service Rp 70.940.918, belanja penggantian suku cadang Rp 24.118.593, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp14.124.192, belanja jasa kir Rp 9.708.800, belanja pajak kendaraan bermotor Rp 2.171.545. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Pagu Dana : Rp 200.000.000 dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 56.630.000,- (28,32%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp143.370.000,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 143.370.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya

Pagu Dana : Rp 309.420.000,dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 264.069.000,- (85,34%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp45.351.000,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja pakaian dinas harian (PDH) Rp 45.351.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pagu Dana : Rp 229.075.240,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 110.475.400,- (48,23%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp118.599.480 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja bahan bakar minyak/gas (digunakan langsung untuk kegiatan) Rp 1.451.240, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 12.820.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 95.688.600, belanja bimbingan teknis Rp 8.640.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Penyusuhan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Pagu Dana : Rp 815.366.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 619.559.300,- (75,99%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp195.806.700 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 676.000, belanja BBM/gas Rp 3.762.600, belanja seminar kit peserta Rp1.000.000, belanja bahan obat-obatan Rp 1.600.000, belanja penggandaan Rp3.201.100, belanja makanan dan minuman rapat Rp340.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 4.460.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp32.544.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 16.411.600, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 121.200.000, belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap Rp 311.400, belanja jasa moderator Rp 8.000.000, belanja jasa MC/pembawa acara Rp 1.200.000, belanja Pembaca Al-Quran Rp1.200.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan SKPD

Pagu Dana : Rp 278.480.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 224.094.000,- (80,47%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sisa dana sebesar Rp 54.385.750,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 2.015.300, belanja BBM/gas Rp 13.216.450, belanja penggandaan Rp 5.929.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp 62.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 3.374.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 28.235.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset SKPD

Pagu Dana : Rp 253.828.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 179.676.100,- (70,79%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sisa dana sebesar Rp74.151.900,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari

belanja BBM/gas Rp 19.700, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp21.635.000,

belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 605.200, belanja honorarium pengelola asset daerah Rp 51.892.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Kajian Perubahan Fungsi Dan Peruntuhan Kawasan Hutan

Pagu Dana : Rp 198.722.000, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 163.771.900,- (82,41%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sisa dana sebesar Rp 34.950.100,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 13.000, belanja BBM/gas Rp 3.690.600, belanja penggandaan Rp 4.828.500, belanja makanan dan minuman rapat Rp 636.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 19.700.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 3.901.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Pagu Dana : Rp 165.167.825,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 131.408.700,- (79,56%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp33.759.125,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 6.500, belanja transportasi Rp 4.940.075, belanja penggandaan Rp1.599.250, belanja pakaian kerja lapangan Rp 600.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 18.195.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp6.418.300, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 2.000.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen

Pagu Dana : Rp 579.070.950, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 440.372.500,- (76,05%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp138.698.450 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 2.049.000, belanja BBM/gas Rp 4.199.200, belanja bahan baku bangunan Rp 18.775.950, belanja bahan obat-obatan Rp 2.322.000, belanja jasa laboratorium Rp 13.330.000, belanja penggandaan Rp 19.235.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp1.334.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp6.990.000, belanja pakaian kerja lapangan Rp9.275.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 15.494.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 2.139.300. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan

Pagu Dana : Rp 116.171.000 dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 100.281.550,- (86,32%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp15.889.450,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 832.650, belanja penggandaan Rp 124.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp 640.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 1.380.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 8.095.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 3.726.800, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 1.100.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan kemasyarakatan, Hutan Negeri, Hutan Tanaman rakyat dan Hutan tanaman Kemitraan

Pagu Dana : Rp 1.050.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 845.614.400,- (80,53%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 204.385.600,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 4.671.300, belanja penggandaan Rp 3.000.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 13.448.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp158.359.500, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 24.906.800. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Pagu Dana : Rp 75.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 63.068.800,- (84,09 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp11.931.200,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 979.700, belanja penggandaan Rp 936.500, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 5.720.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 4.295.000,-

Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pagu Dana : Rp 150.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 133.951.300,- (89.30%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp16.048.700,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 49.000, belanja BBM/gas Rp 2.349.200, belanja penggandaan Rp 500, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 13.650.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)

Pagu Dana : Rp 150.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 125.579.200,- (83,72%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp24.420.800,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 84.000, belanja BBM/gas Rp 13.976.800, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 8.610.000, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 250.000, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 1.500.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu pada Wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pagu Dana : Rp 878.342.500,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 646.350.254,-(73,59%) dan realisasi fisik sebesar 94.51%. Sisa dana sebesar Rp231.992.246,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 500, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp150.000, belanja BBM/gas Rp 29.198.550, belanja bahan baku bangunan Rp 17.752.350, belanja bahan obat-obatan Rp2.500.000, belanja paket /pengiriman Rp1.000.000, belanja penggandaan Rp 1.675.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp200.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 103.180.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 63.475.846, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 11.900.000, belanja jasa pembuatan peta Rp 960.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan Pada wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pagu Dana : Rp 190.500.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 144.461.700,- (75,83%) dan realisasi fisik sebesar 93.56%. Sisa dana sebesar Rp46.038.300,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja perangko, materai dan benda pos lainya Rp 45.000, belanja BBM/gas Rp 5.412.700, belanja penggandaan Rp 1.000.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp1.000.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp27.170.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 11.210.600. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman HUtan

Pagu Dana : Rp 4.200.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 1.653.361.300,- (39,37%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 2.546.638.700,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 40.300, belanja BBM/gas Rp 2.115.150, belanja peralatan/perlengkapan pakai habis Rp 17.000, belanja bahan/bibit tanaman Rp52.500, belanja bahan kimia Rp 8.700, belanja cetak Rp 75.000, belanja penggandaan Rp 5.450, belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp 1.700.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 7.609.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 2.558.200, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 31.457.400, belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan tanaman Rp 483.000.000, belanja modal pengadaan alat laboratorium pertanian Rp 666.000.000, belanja modal pengadaan alat pemeliharaan tanaman Rp1.000.000, belanja modal pengadaan alat penyimpanan Rp 451.000.000, belanja modal pengadaan tanaman kehutanan Rp 900.000.000.

Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) – Dana Reboisasi (DR) pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat direlisasikan karena belum adanya pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan dan pendeknya sisa waktu hingga akhir tahun pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017, pasal 5 (lima) ayat 7 (tujuh) butir f bahwa rincian DBH Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran XI. Pada lampiran tersebut Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Dana Reboisasi (DR) sebesara Rp 14.744.646.000,-. Menurut Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) bahwa DBH Dinas Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke Kabupaten/Kota penghasil, mulai tahun anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut. Selanjutnya pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) butir c dinyatakan bahwa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi tersebut dapat digunakan diantaranya untuk pengelolaan tahura, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air serta pengembangan perbenihan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menerima Dana Reboisasi tersebut dan mengikuti proses perencanaan sesuai aturan yang berlaku dengan menyusun RKA kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sesuai penambahan pagu dananya.

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik

Pagu Dana : Rp 60.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 47.430.950,- (79,05%) dan realisasi fisik sebesar 91%. Sisa dana sebesar Rp12.569.050,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 53.100, belanja bahan/baku bangunan Rp 41.250, belanja bahan/bibit tanaman Rp 3.744.000, belanja bahan kimia Rp 15.200, belanja penggandaan Rp 507.500, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 2.708.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 5.400.000, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 100.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Pagu Dana : Rp 216.900.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 168.073.150,-(77,49%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp48.826.850, merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 1.650.400, belanja BBM/gas Rp4.977.450, belanja peralatan/ perlengkapan pakai habis Rp 360.000, belanja penggandaan Rp2.687.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 3.864.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp18.676.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 2.172.000, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp8.200.000, belanja jasa pembuatan peta Rp6.240.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Pagu Dana : Rp 200.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 175.096.850,- (87,55%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 24.903.150,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 31.800, belanja BBM/gas Rp 650, belanja penggandaan Rp1.150.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp 1.000.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp2.216.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 11.856.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 7.048.700, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp1.600.000,-. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Pagu Dana : Rp 8.148.041.064,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 1.599.037.7487,- (19,62%) dan realisasi fisik sebesar 85%. Sisa dana sebesar Rp 6.549.003.316,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 41.454.500, belanja BBM/gas Rp 262.221.464, belanja seminar kit peserta Rp 7.500.000, belanja peralatan/perlengkapan pakai habis Rp102.800.000, belanja sertifikasi/kalibrasi/akreditasi Rp 167.100.000, belanja jasa akomodasi Rp 58.350.000, belanja transportasi Rp12.000.000, belanja penggandaan Rp 23.655.600, belanja sewa sarana mobilitas darat Rp679.000.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp35.560.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 85.970.000, belanja pakaian kerja lapangan Rp 132.530.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp4.615.014.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 10.332.052, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp50.400.000, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 106.500.000, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 135.895.700, belanja jasa pembuatan peta Rp21.120.000, belanja jasa peliputan Rp1.600.000.

Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) – Dana Reboisasi (DR) pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat direlisasikan karena belum adanya pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan dan pendeknya sisa waktu hingga akhir tahun pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017, pasal 5 (lima) ayat 7 (tujuh) butir f bahwa rincian DBH Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran XI. Pada lampiran tersebut Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Dana Reboisasi (DR) sebesara Rp 14.744.646.000,-. Menurut Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) bahwa DBH Dinas Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke Kabupaten/Kota penghasil, mulai tahun anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut. Selanjutnya pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) butir c dinyatakan bahwa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi tersebut dapat digunakan diantaranya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan serta pengawasan dan perlindungan .

Kegiatan Perlindungan dan Konservasi alam di wilayah kelola KPH

Pagu Dana : Rp 474.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 410.288.250,- (86,56%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp63.711.750, merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 7.045.450, belanja peralatan/perlengkapan pakai habis Rp 4.538.500, belanja bahan baku bangunan Rp 921.000, belanja penggandaan Rp 5.970.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 11.954.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp26.810.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 6.472.800. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah

Pagu Dana : Rp 417.702.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 354.745.200,- (84,93%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp62.956.800,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 614.100,- belanja BBM/gas Rp 12.409.200,- belanja seminar kit peserta Rp 125.000, belanja Transportasi Rp 1.000.000, belanja penggandaan Rp6.000.000, belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp6.365.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp 5.640.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp299.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp20.880.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp5.914.500, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 1.500.000, belanja jasa pembuatan peta Rp 1.760.000, belanja jasa MC/pembawa acara Rp 450.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah

Pagu Dana : Rp 38.300.000 dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 27.995.750,-(73,10%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp10.304.250,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 35.000,- belanja BBM/gas Rp 849.250,- belanja transportasi Rp 500.000,-

belanja makanan dan minuman rapat Rp 920.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 8.000.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pengembangan data dan informasi kehutanan

Pagu Dana : Rp 249.270.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 202.546.750,- (81,26%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp46.723.250,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 6.360.550, belanja bahan percontohan /promosi Rp 190.000, belanja penggandaan Rp 3.388.000, belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp 12.000.000, belanja tanam/bunga untuk tanam hias Rp 500.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp 920.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 7.280.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 16.084.700. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP

Pagu Dana : Rp 239.499.900,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 154.421.500,- (64,48%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp85.078.400,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp46.000, belanja BBM/gas Rp 4.233.300, belanja jasa akomodasi Rp 280.000, belanja transportasi Rp 1.002.000, belanja penggandaan Rp 1.575.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 7.922.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 60.538.900,belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 3.281.200, belanja jasa lembaga sertifikasi Rp 4.200.000, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 200.000, belanja jasa moderator Rp 1.000.000, belanja jasa MC/pembawa acara Rp 150.000, belanja pembacaan doa/Al-Quran Rp150.000, belanja kontribusi pelatihan/magang Rp 500.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Daerah aliran sungai

Pagu Dana : Rp 200.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 167.932.268,- (83,97%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp32.067.732,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja BBM/gas Rp 4.959.700, belanja transportasi Rp 4.500.000, belanja penggandaan Rp1.500, belanja makanan dan minuman rapat Rp 6.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 9.570.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 9.033.532, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 900.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH

Pagu Dana : Rp 906.036.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 613.681.300,- (67,73%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp292.354.700,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 1.579.000, belanja BBM/gas Rp 31.660.200, belanja penggandaan Rp16.260.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp 1.792.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 145.867.500, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 90.396.000, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 4.800.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pagu Dana : Rp 8.370.646.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 1.055.266.250,- (12,61%) dan realisasi fisik sebesar 98%. Sisa dana sebesar Rp 7.315.379.750, merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp 1.684.500, belanja BBM/gas Rp 22.063.350, belanja penggandaan Rp 1.762.500, belanja sewa ruang rapat/pertemuan Rp 3.000.000, belanja sewa sarana mobilitas darat Rp 600.000, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 22.163.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 249.582.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 53.578.400, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 16.300.000. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) – Dana Reboisasi (DR) pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat direlisasikan karena belum adanya pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan dan pendeknya sisa waktu hingga akhir tahun pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017, pasal 5 (lima) ayat 7 (tujuh) butir f bahwa rincian DBH Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran XI. Pada lampiran tersebut Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Dana Reboisasi (DR) sebesara Rp 14.744.646.000,-. Menurut Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) bahwa DBH Dinas Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke Kabupaten/Kota penghasil, mulai tahun anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut. Selanjutnya pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) butir c dinyatakan bahwa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi tersebut dapat digunakan diantaranya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan serta pengawasan dan perlindungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menerima Dana Reboisasi tersebut dan mengikuti proses perencanaan sesuai aturan yang berlaku dengan menyusun RKA kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sesuai penambahan pagu dananya.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi : a) Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, c) Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi : a) Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian; b) Lingkungan akuntansi pemerintahan daerah; c) Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna; d) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; e) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum; f) Asumsi dasar, karekteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsi-prinsip serta kendala informasi akuntansi; g) Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya; h) Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkrualPada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2011 bulan Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

* 1. **Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2017 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

* 1. **Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual.Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yangs seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat : a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

* 1. **Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**1. Pengukuran/ Penilaian Aset**

1. **Kas**

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah , Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

1. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

1. **Piutang**

Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

1. **Persediaan disajikan sebesar :**
   * Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
   * Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
2. **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

1. **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

1. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut .Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

1. **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

1. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai.Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Aset Tetap Lainnya**

* Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman, peralatan dan bahan konstruksi (seperti rangka jembatan,dll yang bisa dibuka pasang). Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
* Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
* Terhadap hewan yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
* Biaya rehab terhadap aset renovasi diberlakukan sebagai berikut:

1) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengelola Aset Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagai pemilik Aset tetap tersebut. Jika sampai akhir tahun, belum diserahkan dengan dokumen pendukung yang lengkap, maka dicatat pada Aset tetap Renovasi SKPD yang melakukan rehab tersebut.

Namun pada kesempatan pertama di tahun selanjutnya segera untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing pemilik Aset Tetapnya.

2) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan SKPD sendiri tetapi milik SKPD lain dilingkungan Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang yang merehab ke Pengelola dan dilanjutkan ke Pengguna Barang yang memiliki Aset tetap tersebut.

1. **Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

* Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
* Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

* Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
* Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

**L. Penyusutan Aset Tetap**

* Mulai Tahun 2014 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
* Nilai yang dapat disusutkan adalah :
  + - Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
    - Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
    - Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
    - Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

**2. Pengukuran/ Penilaian Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

b) Pendapatan Diterima Dimuka

c) Utang Beban

d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat:

a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau

c) Pada saat kewajiban timbul.

1. **Pengukuran/ Penilaian Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

1. **Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA**

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD

c) Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

1. **Pengukuran/ Penilaian Belanja**

1.Pengakuan Belanja

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

1. Pengukuran belanja

Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1. **Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO**

Pengukuran Pendapatan-LO :

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

1. **Pengukuran/ Penilaian Beban**

Pengakuan Beban Pada SKPD

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

1) Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

2) Dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat dicairkankannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas

B. Beban Barang

1) Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang terangkum dalam surat pengesahan pertanggungjawaban yang disahkan/disetujui oleh PA/KPA.

2) Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh penyimpan barang/belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

C. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap lainnya dan aset lainnya. Sedangkan amortisasi dibebankan terhadap aset tidak berwujud.

D. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

* 1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| **1** | **Pendapatan Asli Daerah-LRA**  -Pendapatan Retribusi Daerah | **40.261.000,00**  40.261.000,00 | **42.359.746,00**  42.359.746,00 | **105.21**  105,21 | **48.490.008,00**  48.490.008,00 |

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi tahun 2017 mencapai 105.21% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, maka terdapat penurunan sebesar Rp 6.130.262,00. Penurunan jumlah pendapatan retribusi daerah (sewa rumah dinas) dari tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa rumah dinas di Jalan Raden Saleh No. 8 A diruntuhkan dan diganti dengan pembangunan tempat parkir kendaraan roda 4 (empat), hal ini menyebabkan jumlah setoran sewa rumah dinas menjadi berkurang.

Pendapatan ini terdiri dari: 1.1.2.15.001 Penyewaan Tanah dan Bangunan

Penerimaan pendapatan Penyewatan Tanah dan Bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**5.1.2.PENJELASAN POS-POS BELANJA**

1. **Belanja Operasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| a.  b. | Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa | 44.982.578.176,00  26.911.382.989,00 | 41.884.620.624,00  16.602.561.956,00 | 93.11%  61.69% | 10.580.205.290,00  8.054.757.461,00 |
|  | **Jumlah** | **71.893.961.165,00** | **58.487.182.580,00** | **81.35%** | **18.634.962.751,00** |

1. **Belanja Pegawai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| a.  b. | Belanja Pegawai Tidak Langsung  Belanja Pegawai Langsung | 44.982.578.176,00  - | 41.884.620.624,00  - | 93.11  - | 10.580.205.290,00  - |
|  | JUMLAH | 44.982.578.176,00 | 41.884.620.624,00 | 93.11 | 10.580.205.290,00 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 93.11% dari anggarannya, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp 31.304.415.334,00 hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga pembayaran gaji pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan. Realisasi belanja pegawai tahun 2017 merupakan belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS, dengan rincian objek belanja sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
|
| **I.** | **Belanja Pegawai Tidak Langsung** | **44.982.578.176,00** | **41.884.620.624,00** | 93.11 | **10.580.205.290,00** |
| **A** | **Belanja Gaji dan Tunjangan** | 36.331.370.346,00 | 33.787.406.280,00 | 93.00 | 8.149.217.355,00 |
| 1 | Gaji Pokok PNS/ UangRepresentasi | 27.595.055.226,00 | 26.967.999.900,00 | 97.73 | 6.521.233.100,00 |
| 2 | Tunjangan Keluarga | 3.137.751.500,00 | 2.508.863.676,00 | 79.96 | 590.149.424,00 |
| 3 | Tunjangan Jabatan | 655.340.000,00 | 301.920.000,00 | 46.07 | 301.090.000,00 |
| 4 | Tunjangan Fungsional | 2.145.360.000,00 | 1.781.360.000,00 | 83.03 | 155.220.000,00 |
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum | 962.139.928,00 | 768.615.000,00 | 79.89 | 206.230.000,00 |
| 6 | Tunjangan Beras | 1.777.934.800,00 | 1.421.314.920,00 | 79.94 | 335.304.600,00 |
| 7 | Tunjangan PPh/Tunj. Khusus | 56.675.100,00 | 36.985.301,00 | 65.26 | 39.901.164,00 |
| 8 | Pembulatan Gaji | 1.113.792,00 | 347.483,00 | 31.20 | 89.067,00 |
| **B** | **Belanja Tambahan Penghasilan PNS** | 8.650.000.000,00 | 8.097.214.344,00 | 93.61 | 2.430.987.935,00 |
| 1 | Tamb. Penghasilanberdasarkan beban kerja | 8.650.000.000,00 | 8.097.214.344,00 | 93.61 | 2.430.987.935,00 |
| **C** | **Insentif Pemungutan RetribusiDaerah** | 1.207.830,00 | - |  | - |
|  | **Jml Blj Pegawai Tdk Langsung** | **44.982.578.176,00** | **41.884.620.624,00** | 93.11 | **10.580.205.290,00** |
|  | | | | | |

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto, setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp5.442.938,00 yang merupakan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan bulan Oktober 2017 An. Sunardi sebesar Rp 5.442.938,00.

1. **Belanja Barang & Jasa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| 1 | Belanja Barang dan Jasa | 26.911.382.989,00 | 16.602.561.956,00 | 61.69 | 8.054.757.461,00 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi tahun 2017 mencapai 61.69% dari anggarannya dan sisa anggaran belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp.10.308.821.033,00. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp8.547.804.495,00.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PERKIRAAN** | **ANGGARAN 2017** | **REALISASI 2017** | **%** | **TAHUN 2016** |
| **A** | **Belanja Bahan Pakai Habis** | **1.752.411.670,00** | **1.059.375.450,00** | **60.45** | **460.923.650,00** |
| 1 | Belanja alat tulis kantor | 354.080.800,00 | 301.664.100,00 | 85.20 | 115.167.850,00 |
| 2 | Belanja alat listrik dan elektronik | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 100.00 | 9.987.000,00 |
| 3 | Belanja perangko, materai danbenda pos lainnya | 40.350.000,00 | 36.855.000,00 | 91.34 | 8.070.000,00 |
| 4 | Belanja BBM/Gas(digunakan langsung untukkegiatan) | 795.702.320,00 | 304.933.300,00 | 38.32 | 127.653.050,00 |
| 5 | Belanja Seminar Kit Peserta | 44.400.000,00 | 35.775.000,00 | 80.57 | 14.375.000,00 |
| 6 | Belanja peralatan/perlengkapanpakai habis | 455.878.550,00 | 318.148.050,00 | 69.79 | 185.670.750,00 |
| **B** | **Belanja Bahan/Material** | **818.385.484,00** | **769.631.050,00** | **94.04** | **962.703.250,00** |
| 1 | Belanja bahan baku bangunan | 195.238..684,00 | 157.336.650,00 | 80.59 | 215.468.000,00 |
| 2 | Belanja bahan/bibit tanaman | 575.947.600,00 | 571.731.100,00 | 99.27 | 663.336.350,00 |
| 3 | Belanja bahan obat-obatan | 14.100.000,00 | 7.678.000,00 | 54.45 | 1.400.000,00 |
| 4 | Belanja bahan kimia | 19.099.200,00 | 19.075.300,00 | 99.87 | 79.543.900,00 |
| 5 | Belanja BahanPercontohan/Promosi | 14.000.000,00 | 13.810.000,00 | 98.64 | 2.955.000,00 |
| **C** | **Belanja Jasa Kantor** | **1.596.503.075,00** | **1.067.979.314,00** | **66.89** | **366.477.604,00** |
| 1 | Belanja telepon | 46.323.990,00 | 25.078.487,00 | 54.14 | 8.204.604,00 |
| 2 | Belanja air | 48.300.000,00 | 25.025.450,00 | 51.78 | 14.352.050,00 |
| 3 | Belanja listrik | 304.166.340,00 | 163.562.359,00 | 53.77 | 115.096.377,00 |
| 4 | Belanja surat kabar/majalah | 31.800.000,00 | 10.704.000,00 | 33.66 | 10.958.000,00 |
| 5 | Belanjakawat/faksimili/internet/VPN | 128.679.670,00 | 79.744.645,00 | 61.97 | 61.524.250,00 |
| 6 | Belanja paket/pengiriman | 1.320.000,00 | 0.00 | 0.00 | 120.000,00 |
| 7 | Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi | 212.700.000,00 | 45.600.000,00 | 21.44 | - |
| 8 | Belanja Jasa Laboratorium | 43.000.000,00 | 29.670.000,00 | 69.00 | - |
| 9 | Belanja Jasa Publikasi | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 100.00 | 400.00000 |
| 10 | Belanja jasa akomodasi | 153.556.000,00 | 92.508.000,00 | 60.24 | 29.793.000,00 |
| 11 | Belanja pajak bumi dan bangunan | 1.000.000,00 | 989.323,00 | 98.93 | 989.32300 |
| 12 | Belanja Transportasi | 617.127.075,00 | 586.597.050,00 | 95.05 | 125.040.000,00 |
| **D** | **Belanja Premi Asuransi** | **30.000.000,00** | **28.098.600,00** | **93.66** | **-** |
| **1** | Belanja Premi Asuransi BMD | 30.000.000,00 | 28.098.600,00 | 93.66 | - |
| **E** | **Belanja Perawatan KendaraanBermotor** | **385.000.000,00** | **263.935.952,00** | **68.55** | **142.699.381,00** |
| 1 | Belanja Jasa Service | 94.450.000,00 | 23.509.082,00 | 24.89 | 26.462.289,00 |
| 2 | Belanja Penggantian SukuCadang | 136.500.000,00 | 112.381.407,00 | 82.33 | 65.333.427,00 |
| 3 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasdan pelumas | 88.500.000,00 | 74.375.808,00 | 84.04 | 33.774.900,00 |
| 4 | Belanja Jasa KIR | 10.200.000,00 | 491.200,00 | 4.82 | - |
| 5 | Belanja Pajak KendaraanBermotor | 55.350.000,00 | 53.178.455,00 | 96.08 | 17.128.765,00 |
| **F** | **Belanja Cetak dan Penggandaan** | **530.978.500,00** | **423.269.000,00** | **79.71** | **198.024.700,00** |
| 1 | Belanja cetak | 217.245.000,00 | 217.170.000,00 | 99.97 | 92.246.000,00 |
| 2 | Belanja Penggandaan | 313.733.500,00 | 206.099.000,00 | 65.69 | 105.778.700,00 |
| **G** | **Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir** | **97.200.000,00** | **73.635.000,00** | **75.76** | **27.500.000,00** |
| 1 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 90.200.000,00 | 67.135.000,00 | 74.43 | 25.000.000,00 |
| 2 | Belanja sewa ruangrapat/pertemuan | 7.000.000,00 | 6.500.000,00 | 92.86 | 2.500.000,00 |
| **H** | **Belanja Sewa Sarana Mobilitas** | **694.900.000,00** | **15.300.000,00** | **2.20** | **750.00000** |
| 1 | Belanja sewa Sarana MobilitasDarat | 694.900.000,00 | 15.300.000,00 | 2.20 | - |
| 2 | Belanja sewa Sarana Mobilitas Air | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 750.00000 |
| **I** | **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor** | **15.000.000,00** | **14.500.000,00** | **96.67** | **10.000.000,00** |
| 1 | Belanja sewa taman/bunga untuktaman hias | 15.000.000,00 | 14.500.000,00 | 96.67 | 5.000.000,00 |
| 2 | Belanja sewa bandwidth | - | ,00 |  | 5.000.000,00 |
| **J** | **Belanja Makanan dan Minuman** | **1.042.574.500,00** | **796.676.000,00** | **76.41** | **168.476.000,00** |
| 1 | Belanja makanan dan minumanrapat | 201.284.000,00 | 129.468.000,00 | 64.32 | 30.770.000,00 |
| 2 | Belanja makanan dan minumankegiatan | 834.330.500,00 | 661.448.000,00 | 79.28 | 123.114.000,00 |
| 3 | Belanja makanan dan minumanHarian Pengaman | 6.960.000,00 | 5.760.000,00 | 82.76 | 14.592.000,00 |
| **K** | **Belanja Pakaian Dinas danAtributnya** | **309.420.000,00** | **264.069.000,00** | **85.34** | **82.852.000,00** |
| 1 | Belanja Pakaian Dinas Harian(PDH) | 309.420.000,00 | 264.069.000,00 | 85.34 | 82.852.000,00 |
| **L** | **Belanja Pakaian Kerja** | **292.231.500,00** | **146.387.500,00** | **50.09** | **17.650.000,00** |
| 1 | Belanja pakaian kerja lapangan | 292.231.500,00 | 146.387.500,00 | 50.09 | 17.650.000,00 |
| **M** | **Belanja Perjalanan Dinas** | **14.210.853.900,00** | **7.891.631.349,00** | **55.53** | **2.642.706.751,00** |
| 1 | Belanja perjalanan dinas dalamdaerah | 12.535.029.900,00 | 6.783.079.500,00 | 54.11 | 2.293.623.970,00 |
| 2 | Belanja perjalanan dinas luardaerah | 1.558.563.000,00 | 1.036.567.918,00 | 66.51 | 349.082.781,00 |
| 3 | Belanja perjalanan dinas luar negeri | 117.261.000,00 | 71.983.931,00 | 61.39 | - |
| **N** | **Belanja Pemeliharaan** | **485.400.000,00** | **291.031.000,00** | **59.96** | **331.910.600,00** |
| 1 | Belanja Pemeliharan Peralatandan Mesin | 250.400.000,00 | 56.630.000,00 | 22.62 | 72.181.000,00 |
| 2 | Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan | 235.000.000,00 | 234.401.000,00 | 99.75 | 259.729.600,00 |
| **O** | **Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknisPNS** | **20.000.000,00** | **11.360.000,00** | **56.80** | **4.500.000,00** |
| 1 | Belanja Pelatihan. | 20.000.000,00 | 11.360.000,00 | 56.80 | 4.500.000,00 |
| **P** | **Belanja Jasa Lembaga** | **251.607.802,00** | **247.401.783,00** | **98.33** | **232.496.800,00** |
| 1 | Belanja jasa lembaga sertifikasi | 35.000.000,00 | 30.800.000,00 | 88.00 | 16.500.000,00 |
| 2 | Belanja jasa lembaga pengamanan | 216.607.802,00 | 216.601.783,00 | 100.00 | 215.996.800,00 |
| **Q** | **Honorarium PNS** | **957.782.000,00** | **670.040.000,00** | **69.96** | **231.880.000,00** |
| 1 | Honorarium TenagaAhi/Instruktur/Narasumber | 568.690.000,00 | 335.790.000,00 | 59.05 | 27.850.000,00 |
| 2 | Honorarium Pengelola KeuanganDaerah | 241.200.000,00 | 239.250.000,00 | 99.19 | 150.030.000,00 |
| 3 | Honorarium Pengelola Asset Daerah | 85.492.000,00 | 33.600.000,00 | 39.30 | 25.200.000,00 |
| 4 | Honorarium Pengelola SIPKD | 24.000.000,00 | 23.000.000,00 | 95.83 | 18.000.000,00 |
| 5 | Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 100.00 | 4.800.000,00 |
| 6 | Honorarium Pengelola SIMGAJIPNSD | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100.00 | 6.000.000,00 |
| 7 | Honorarium Pengelola SIMBANGDA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100.00 | 2.000.000,00 |
| **R** | **Honorarium Non PNS** | **2.700.361.404,00** | **2.330.968.458,00** | **86.32** | **911.672.725,00** |
| 1 | Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber | 11.500.000,00 | 10.000.000,00 | 86.96 | 42.650.000,00 |
| 2 | Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap | 108.200.000,00 | 107.243.600,00 | 99.12 | 66.820.000,00 |
| 3 | Honorarium Pengelola SIPKD | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100.00 | 12.000.000,00 |
| 4 | Belanja Jasa Moderator | 39.500.000,00 | 30.500.000,00 | 77.22 | 9.000.000,00 |
| 5 | Belanja Jasa Pengawas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.400.000,00 |
| 6 | Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor | 1.104.692.000,00 | 892.138.900,00 | 80.76 | 706.220.000,00 |
| 7 | Belanja Jasa Pembuatan Peta(Manual/Tematik/Digital) | 119.040.000,00 | 74.080.000,00 | 62.23 | 13.280.000,00 |
| 8 | Belanja Jasa MC/Pembawa Acara | 5.100.000,00 | 3.300.000,00 | 64.71 | 750.00000 |
| 9 | Belanja Pembaca Doa/Al-Quran | 6.250.000,00 | 3.900.000,00 | 62.40 | 3.600.000,00 |
| 10 | Belanja Jasa Pengamanan Kantor | 278.495.745,00 | 237.612.622,00 | 85.32 |  |
| 11 | Belanja Jasa Petugas Kebersihan | 292.002.625,00 | 258.312.302,00 | 88.46 |  |
| 12 | Belanja Jasa Sopir | 28.081.034,00 | 28.081.034,00 | 100.00 | 25.152.725,00 |
| 13 | Belanja Jasa Peliputan | 1.600.000,00 | - | - | - |
| 14 | Belanja JasaPenceramah/Rohaniwan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100.00 | 5.000.000,00 |
| 15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 688.900.000,00 | 668.800.000,00 | 97.08 | 10.800.000,00 |
| **S** | **Belanja Kontribusi** | **4.000.000,00** | **3.500.000,00** | **87.50** | **7.000.000,00** |
| 1 | Belanja KontribusiPelatihan/Magang | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 87.50 | 7.000.000,00 |
| **T** | **Belanja Jasa Lainnya.** | **716.773.154,00** | **233.772.500,00** | **32.61** | **1.254.534.000,00** |
| 1 | Belanja Jasa Cleaning Service | 233.773.154,00 | 233.772.500,00 | 100.00 | 210.445.000,00 |
| 2 | Belanja Jasa Pembuatan danPemeliharaan Tanaman | 483.000.000,00 | ,00 |  | 1.044.089.000,00 |
|  | **JUMLAH** | **26.911.382.989,00** | **16.602.561.956,00** |  | **8.054.757.461,00** |

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, serta tidak ada pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2017.

1. **Belanja Modal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| **1** | **Belanja Modal** | **10.854.246.000,00** | **1.824.878.500,00** | **16.81%** | **5.515.381.475** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 16.81% dari anggarannya. Sisa belanja modal adalah sebesar Rp 9.029.367.500,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp 3.690.502.975,00 karena dari anggaran belanja modal tersebut terdapat anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak dapat direalisasikan. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Adapun daftar rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| A | Belanja Modal Peralatan &Mesin | 9.678.146,000,00 | 1.563.605.500,00 | 16.16% | 3.253.095.475,00 |
| B | Belanja Modal Gedung & Bgn | 266.500.000,00 | 261.273.000,00 | 98.04% | 2.262.286.000,00 |
| C | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 909.600.000,00 | - | - | - |
|  | **Jumlah** | **10.854.246.000,00** | **1.824.878.500,00** | **16.81%** | **5.515.381.475,00** |

1. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| A. | Belanja Modal Peralatan & Mesin | 9.678.146,000,00 | 1.563.605.500,00 | 16.16% | 3.253.095.475,00 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 16.16% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp1.689.489.975,00.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adapun rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 terdiri dari :**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Sisa Anggaran** | | **A** | **BM Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor** | 5.917.753.500,00 | 1.225.708.500,00 | 20.71 | 4.692.045.000,00 | | 1 | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 5.697.253.500,00 | 1.195.258.500,00 | 20.98 | 4.501.995.000,00 | | 2 | Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 220.500.000,00 | 30.450.000,00 | 13.81 | 190.050.000,00 | | **B** | **BM Pengadaan Alat Pengolahan** | 666.000.000,00 | - | - | 666.000.000,00 | | 1 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian | 666.000.000,00 | - | - | 666.000.000,00 | | **C** | **BM Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/ AlatPenyimpan** | 641.000.000,00 | 189.000.000,00 | 29.49 | 452.000.000,00 | | 1 | Belanja modal Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman | 190.000.000,00 | 189.000.000,00 | 99.47 | 1.000.000,00 | | 2 | Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan | 451.000.000,00 | - | - | 451.000.000,00 | | **D** | **BM Pengadaan AlatRumah Tangga** | 1.161.642.500,00 | 58.081.000,00 | 5.00 | 1.103.561.500,00 | | 1 | Belanja modal PengadaanMeubelair | 34.500.000,00 | 34.331.000,00 | 99.51 | 169.000,00 | | 2 | Belanja modal Pengadaan AlatPendingin | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 100.00 | - | | 3 | Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | 1.103.392.500,00 | - | - | 1.103.392.500,00 | | **E** | **BM Pengadaan Sistim Komputer** | 76.250.000,00 | 75.416.000,00 | 98.91 | 834.000,00 | | 1 | Belanja modal PengadaanKomputer Unit/Jaringan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 100.00 | - | | 2 | Belanja Modal Pengadaan Printer | 11.250.000,00 | 10.416.000,00 | 92.59 | 834.000,00 | | **F** | **BM Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat** | 15.500.000,00 | 15.400.000,00 | 99.35 | 100.000,00 | | 1 | Belanja modal Meja Kerja Pejabat | 10.000.000,00 | 9.950.000,00 | 99.50 | 50.000,00 | | 2 | Belanja modal Kursi Kerja Pejabat | 5.500.000,00 | 5.450.000,00 | 99.09 | 50.000,00 | | **G** | **BM BLUD** | 1.200.000.000,00 | - | - | 1.200.000.000,00 | | 1 | Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Mesin | 1.200.000.000,00 | - | - | 1.200.000.000,00 | |  | **JUMLAH** | **9.678.146,000,00** | **1.563.605.500,00** | **16.16** | **8.114.540.500,00** | | | | | | |
| Rendahnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yaitu sebesar 16.16% disebabkan karena belum adanya pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan pendeknya sisa waktu hingga akhir tahun pelaksanaan sehingga belanja modal peralatan mesin yang berasal dari Dana Bagi Hasil tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan. | | | | | |
| **B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| **1.** | **BM Gedung dan Bangunan** | **266.500.000,00** | **261.273.000,00** | **98.04** | **2.262.286.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2017 dan tahun 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 98.04% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp 2.001.013.000 atau sebesar 88.45%.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Sisa Anggaran** |
| **1** | **BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja** | **266.500.000,00** | **261.273.000,00** | **98.04** | **5.227.000,00** |
| a. | BM Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 199.000.000,00 | 194.745.000,00 | 97.86 | 4.255.000,00 |
| b. | BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 67.500.000,00 | 66.528.000,00 | 98.56 | 972.000,00 |
|  | **Jumlah** | **266.500.000,00** | **261.273.000,00** | **98.04** | **5.227.000,00** |

Sisa belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp 5.227.000,- adalah sisa dari anggaran belanja modal pengadaan tempat parkir kendaraan roda 4 senilai Rp4.255.000,- dan sisa belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya senilai Rp 972.000,-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | | | | | |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| **1.** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **909.600.000,00** | **-** | **-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 dan tahun 2016. Tidak ada realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama tahun 2017.

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Sisa Anggaran** |
| **1** | **Belanja modal Pengadaan Buku** | **9.600.000,00** | **-** | **-** | 9.600.000,00 |
| a | Belanja modal Pengadaan Buku Umum | 9.600.000,00 | - | - | 9.600.000,00 |
| **2** | **Belanja modal Pengadaan Tanaman** | **900.000.000,00** | **-** | **-** | 900.000.000,00 |
| a | Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan | 900.000.000,00 | - | - | 900.000.000,00 |
|  | **Jumlah** | **909.600.000,00** | **-** | **-** | **909.600.000,00** |

Sisa belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp 909.600.000,- adalah sisa dari anggaran belanja modal yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak dapat direalisasikan yaitu untuk belanja modal pengadaan tanaman kehutanan sebesar Rp.900.000.000,- dan belanja modal pengadaan buku umum sebesar Rp.9.600.000 karena tidak ada buku yang sesuai dengan yang dianggarkan.

Tidak terealisasinya belanja modal pengadaan tanaman kehutanan disebabkan oleh sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 pada pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima) bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnnya disalurkan ke Kabupaten/Kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabiltasi hutan diwilayah provinsi tersebut dan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, pasal 5 (lima) ayat 7 (tujuh) bahwa rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Dana Reboisasi sebesar Rp14.744.646.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengikuti proses perencanaan sesuai aturan yang berlaku dengan menyusun RKA kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sesuai penambahan pagu dana tersebut.

Belum adanya pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan pendeknya sisa waktu hingga akhir tahun pelaksanaan sehingga belanja modal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan.

Daftar Belanja Modal Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

**5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA**

**5.2.1. Aset**

**Aset Lancar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0.00 | 0,00 |
| Beban Barang Dibayar Dimuka | 0.00 | 2.123.175,00 |
| Beban Jasa Dibayar Dimuka | 2.341.550,00 |  |
| Persediaan | 94.241.500,00 | 23.207.650,00 |
| **Jumlah Aset Lancar** | 96.583.050,00 | 25.330.825,00 |

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00 | 0.00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, sisa UYHD sebesar Rp.164.076.643,- , telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2017. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 15.580.769.416,00 | 15.580.769.416,00 | - |

Penambahan adalah penerimaan Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.219.000.000,- dan total penerimaan SP2D GU Tahun 2017 sebesar Rp 11.361.769.416,-

Pengeluaran adalah belanja langsung berdasarkan pengesahan spj bulan Januari s.d Desember 2017 sebesar Rp 15.416.692.773,- dan penyetoran sisa UYHD ke kas daerah sebesar Rp.164.076.643,- pada tanggal 29 Desember 2017

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. **Kas di Bendahara Penerimaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0.00 | 0.00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Kas di Bendahara Penerimaan | - | 42.359.746,00 | 42.359.746,00 | - |

Penambahan adalah jumlah pendapatan/penerimaan sewa rumah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebesar Rp 42.359.746,-

Pengurangan adalah sejumlah pendapatan yang disetorkan ke kas daerah setiap awal bulannya.

1. **Beban Dibayar Dimuka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Beban dibayar dimuka | 2.341.550,00 | 2.123.175,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa beban premi asuransi barang milik daerah yaitu beban premi asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 5 (lima) unit kendaraan yaitu kendaraan BA 1599 B, BA 1624 B, BA 8385 B, BA 8386 B, BA 8389 B. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 pada rekening belanja premi asuransi senilai Rp 28.098.600,00 maka yang menjadi beban jasa premi asuransi BMD tahun 2017 adalah senilai Rp 25.757.050,- dan yang menjadi beban tahun 2017 adalah senilai Rp 2.341.550,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Beban Dibayar Dimuka | 2.123.175,00 | 2.341.550,00 | 2.123.175.00 | 2.341.550,00,- |

Penambahan beban jasa dibayar dimuka/beban jasa premi asuransi BMD senilai Rp2.341.550,00 adalah berasal dari belanja premi asuransi barang milik daerah yang seharusnya menjadi beban tahun 2018.

Daftar beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 11.

1. **Persediaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Persediaan | 94.241.500,00 | 23.207.650,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| **A. Persediaan Bahan** |  |  |  |  |
| **Pakai Habis** |  |  |  |  |
| 1.Persediaan ATK | 20.909.150,00 | 47.621.750,00 | 39.001.150,00 | 29.529.750,00 |
| 2.Persed Alat Listrik | 1.298.500,00 | 28.168.500,00 | 0.00 | 29.467.000,00 |
| dan Elektronik |  |  |  |  |
| 4.Persed BBM/Gas | 0,00 | 10.040.750,00 | 0.00 | 10.040.750,00 |
| 5.Persed Bahan   Dokumentasi/   Cetakan | 1.000.000,00 | 66.293.300,00 | 42.089.300,00 | 25.204.000,00 |
| 1. **Persediaan Bahan/Material** |  |  |  |  |
| 1. Persed Bahan/ Bibit Tanaman | 0.00 | 35.700.549,00 | 35.700.549,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| **Total Persediaan** | **23.207.650,00** | **187.824.849,00** | **116.790.999,00** | **94.241.500,00** |

Daftar persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

**Aset Tetap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Tanah | 34.549.439.763,00 | 33.944.327.600,00 |
| Peralatan dan Mesin | 29.172.192.547,27 | 8.791.072.170.18 |
| Gedung dan Bangunan | 11.532.822.420,00 | 6.798.468.842,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 60.693.500,00 | 366.684.500,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | (20.345.389.167,97) | (4.949.774.874,42) |
| Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan | (3.613.322.475,35) | (2.549.376.508,19) |
| JUMLAH ASET TETAP | **51.371.436.586,95** | **42.416.401.729,57** |

1. **Tanah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Tanah | 34.549.439.763,00 | 33.944.327.600,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 31.787.880.000,00
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 2.741.159.763,00
   3. Appraisal 2011 Rp. -
   4. Appraisal 2012 Rp. -
   5. Appraisal 2013 Rp. -
   6. Appraisal 2014 Rp. -
   7. Appraisal 2015 Rp. -
   8. Appraisal 2016 Rp. 20.400.000,00
   9. Appraisal 2017 Rp. -

Daftar Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Tanah | 33.944.327.600,00 | 605.112.163,00 | - | 34.549.439.763,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Saldo Audited 2016** |  | **33.944.327.600,00** |
|  | **Mutasi Tambah** |  |  |
|  | Hibah dari Kabupaten/Kota |  | 605.112.163,00 |
|  | **Total Mutasi Tambah** |  | **605.112.163,00** |
|  | **Mutasi Kurang** |  |  |
|  | **Total Mutasi Kurang** |  | **0,00** |
|  | **Total Mutasi** |  | **605.112.163,00** |
|  | **Saldo per 31 Des 2017** |  | **34.549.439.763,00** |
|  |  |  |  |

**Penjelasan Mutasi Tambah:**

Hibah dari Kabupaten/Kota senilai Rp.605.112.163,00 merupakan penambahan nilai aset tanah akibat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga adanya pemindahan aset dari Kabupaten/Kota ke pusat (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada Lampiran 17.

1. **Peralatan dan Mesin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Peralatan dan Mesin | 29.172.192.547,27 | 8.791.072.170,18 |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016.

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 1.394.708.563,00
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 27.777.483.984,27
   3. Appraisal 2011 Rp. –
   4. Appraisal 2012 Rp. –
   5. Appraisal 2013 Rp. –
   6. Appraisal 2014 Rp. –
   7. Appraisal 2015 Rp. –
   8. Appraisal 2016 Rp. –
   9. Appraisal 2017 Rp. –

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Peralatan dan Mesin | 8.791.072.170,18 | 20.570.120.377,09 | | 189.000.000,00 | 29.172.192.547,27 |
| Akum Penys Peralatan dan Mesin | 4.949.774.874,42 | 15.395.614.293,55 | |  | 20.345.389.167,97 |
| Nilai Buku | 3.841.297.295,76 | 5.174.506.083,54 | | 189.000.000,00 | 8.826.803.379,30 |
|  | **Saldo Audited 2016** | |  | **8.791.072.170,18** | |
|  | **Mutasi Tambah** | |  |  | |
|  | -Belanja Modal tahun 2017  -Hibah dari Kabupaten/Kota  -Hibah dari Pihak Ketiga  -Koreksi tambah nilai | |  | 1.563.605.500,00  17.862.184.877,09  1.144.330.000,00  0,01 | |
|  | **Total Mutasi Tambah** | |  | **20.570.120.377,09** | |
|  | **Mutasi Kurang**  Reklas ke Aset Gedung & Bgn | |  | 189.000.000,00 | |
|  | **Total Mutasi Kurang** | |  | **189.000.000,00** | |
|  | **Total Mutasi** | |  | **20.381.120.377,09** | |
|  | **Saldo per 31 Desember 2017** | |  | **29.172.192.547,27** | |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.563.605.500,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
2. Hibah dari Kabupaten/Kota senilai Rp.17.862.184.877,09 merupakan penambahan nilai aset peralatan dan mesin akibat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan adendum BAST P2D sehingga adanya pemindahan aset dari Kabupaten/Kota ke pusat (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)
3. Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp 1.144.330.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
   * + Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp.897.600.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No.BA.53/ MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.5535/MENLHK-SETJEN/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 tentang Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang Berada pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Brat, dengan perincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Merk/Type** | **Jml**  **(Unit)** | **Tahun Pero-lehan** | **Nilai Perolehan** |
| 1 | Kendaraan Roda 4 | Toyota Hilux/2.5E Double Cabin | 1 | 2017 | 382..000.000,00 |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | Toyota Hilux/2.5E Double Cabin | 1 | 2017 | 382..000.000,00 |
| 3 | Kendaraan Roda 2 | Kawasaki Trail | 1 | 2017 | 33.400.000,00 |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | Kawasaki Trail | 1 | 2017 | 33.400.000,00 |
| 5 | Kendaraan Roda 2 | Kawasaki Trail | 1 | 2017 | 33.400.000,00 |
| 6 | Kendaraan Roda 2 | Kawasaki Trail | 1 | 2017 | 33.400.000,00 |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **897.600.000,00** |

* + - Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp.246.730.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No.BA.66/ MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2017 Tanggal 6 Desember 2017 dan Naskah Perjanjian Hibah Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor PKS.65/MENLHK-SETJEN/ Roum/Kap.3/12/2017 Tanggal 6 Desember 2017 tentang Hibah Barang Milik Negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan perincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Merk/Type** | **Jml**  **(Unit)** | **Tahun Perole-han** | **Nilai Perolehan** | **Akumulasi Penyusutan** |
| 1 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125HAK (B 6863 PWQ) | 1 | 2013 | 15.990.000 | 7.995.000 |
| 2 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125HAK (B 6821 PWQ) | 1 | 2013 | 15.990.000 | 7.995.000 |
| 3 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125HAK (B 6778 PWQ) | 1 | 2013 | 15.990.000 | 7.995.000 |
| 4 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125HAK  (B 6790 PWQ) | 1 | 2013 | 15.990.000 | 7.995.000 |
| 5 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125HAK  (B 6773 PWQ) | 1 | 2013 | 15.940.000 | 7.970.000 |
| 6 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125HAK  (B 6724 PWQ) | 1 | 2013 | 15.940.000 | 7.970.000 |
| 7 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki FL125RCD1  (B 6892 PWQ) | 1 | 2013 | 15.210.000 | 7.605.000 |
| 8 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Shougun125  (B 6607 PNQ) | 1 | 2010 | 13.360.000 | 11.690.000 |
| 9 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6582 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 10 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6306 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 11 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6338 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 12 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6621 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 13 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6608 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 14 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6468 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 15 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6614 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
| 16 | Sepeda Motor Roda Dua | Suzuki Thunder EN125A  (B 6451 PNQ) | 1 | 2010 | 15.290.000 | 13.378.750 |
|  | **Jumlah** |  | **16** |  | **246.730.000** | **174.245.000** |

**Penjelasan Mutasi Kurang**

1. Reklas ke Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp 189.000.000,00 yaitu berupa Rak Bibit Persemaian UPTD BPTH karena Pengadaan Rak Bibit Persemaian tersebut masuk ke dalam kategori Aset Tetap gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Merk/Type** | **Jml**  **(Unit)** | **Tahun Perolehan** | **Nilai Perolehan** |
| 1 | Rak Bibit Persemaian UPTD HPTH | - | 1 | 2017 | 189.000.000,00 |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **189.000.000,00** |

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

1. **Gedung dan Bangunan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Gedung dan Bangunan | 11.532.822.420,00 | 6.798.468.842,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 2.517.400.000,00
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 8.231.722.900,00
   3. Appraisal 2011 Rp. 536.260.000,00
   4. Apraisal 2012 Rp. -
   5. Apraisal 2013 Rp. -
   6. Apraisal 2014 Rp.
   7. Appraisal 2016 Rp. 247.439.520,00
   8. Appraisal 2017 Rp. -

Daftar gedung dan bangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | | Penambahan | | | Pengurangan | | Saldo Akhir |
| Gedung dan Bangunan | 6.798.468.842,00 | | 4.734.353.578,00 | | |  | | 11.532.822.420,00 |
| Akum Penys Gdg & Bgn | 2.549.376.508,19 | | 1.063.945.967,16 | | |  | | 3.613.322.475,35 |
| Nilai Buku | 4.249.092.333,81 | | 3.670.407.610,84 | | |  | | 7.919.499.944,65 |
|  | **Saldo Audited 2016** | | |  | | | **6.798.468.842,00** | |
|  | **Mutasi Tambah** | | |  | | |  | |
|  | Belanja Modal Tahun 2017  Hibah dari Kabupaten/Kota  Hibah dari Pihak Ketiga | | | | |  | 261.273.000,00  2.946.605.328,00  585.000.000,00 | |
|  | Reklas dari aset perlt & mesin | | | | |  | 189.000.000,00 | |
|  | Reklas dari aset tetap lainnya | | | | |  | 365.286.500,00 | |
|  | Reklas dari aset lainnya | | | | |  | 387.188.750,00 | |
|  | **Total Mutasi Tambah** | | | | |  | **4.734.353.578,00** | |
|  | **Mutasi Kurang** | | | | |  |  | |
|  | **Total Mutasi Kurang** | | | | |  | **0,00** | |
|  | **Total Mutasi** | | | | |  | **4.734.353.578,00** | |
|  | **Saldo per 31 Des 2017** | | | | |  | **11.532.822.420,00** | |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 261.273.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
2. Hibah dari Kabupaten/Kota senilai Rp2.946.605.328,00 merupakan penambahan nilai aset gedung dan bangunan akibat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan adendum BAST P2D sehingga adanya pemindahan aset dari Kabupaten/Kota ke pusat (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)
3. Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp585.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.7/Menlhk-Setjen/Rokum/Kap.3/2/2017 Tanggal 22 Februari 2017 yaitu bangunan gedung kantor seluas 225 m2 yang beralamat Jl. Raya Indarung Cengkeh Kec. Lubuk Kilangan Padang.
4. Reklasifikasi senilai Rp 941.475.250,00 terdiri atas :

* Reklasifikasi senilai Rp 365.286.500,00 yaitu dari Aset Tetap Lainnya/Aset Tetap Renovasi karena gedung kantor UPTD KPHL pada tahun 2016 bukanlah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga bangunan gedung kantor UPTD KPHL dimasukkan ke dalam kelompok Aset Tetap Lainnya/Aset Tetap Renovasi, namun tahun ini gedung kantor UPTD KPHL sudah dihibahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga bangunan penunjang gedung kantor UPTD KPHL direklas kembali ke asset gedung dan bangunan yang terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Letak / Alamat** | **Luas (m2)** | **Tahun Perole- han** | **Nilai Perolehan** |
| 1 | Pembangunan pagar kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 222.826.000 |
| 2 | Pembangunan Sumur dan jaringan | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 19.965.000 |
| 3 | Pembangunan Pos Jaga Kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 36.000.000 |
| 4 | Pembangunan Garasi Kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 80.000.000 |
| 5 | Plang Nama Kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 6.495.500 |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **365.286.000** |

* Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin senilai Rp 189.000.00,00 yaitu berupa pengadaan rak bibit persemaian UPTD BPTH tahun 2017 karena masuk dalam kelompok aset gedung dan bangunan.
* Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp 387.188.750,00 yaitu berupa bangunan yang berada di Kabupaten/Kota yang semula merupakan aset yang dipakai oleh pihak lain namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 dimana sudah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas di masing-masing kabupaten/kota maka bangunan tersebut yang memakai tahun 2017 adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Letak / Alamat** | **Luas (m2)** | **Tahun Perole- han** | **Nilai Perolehan** | **Akumulasi Penyusutan** |
| 1 | Bangunan Kantor | Desa Silaut Kab. Pesisir Selatan | - | 1995 | 23.950.000 | 10.538.000 |
| 2 | Bangunan Rumah Tinggal | Desa Api-Api Kec. Bayang Pesisir Selatan | - | 1984 | 24.200.000 | 11.132.000 |
| 3 | Bangunan Rumah Tinggal | Jl. Raya Sago Pesisir Selatan | - | 1984 | 25.900.000 | 11.914..000 |
| 4 | Bangunan Kantor | Alang Rambah Pesisir Selatan | - | 1995 | 4.480.000 | 1.971.200 |
| 5 | Bangunan Kantor | Jl. Pertanian Labuh Silang Payakumbuh | - | 1986 | 32.300.000 | 20.026.000 |
| 6 | Bangunan Kantor | Jl.Pertanian Payakumbuh Barat |  | 1986 | 31.800.000 | 19.716.000 |
| 7 | Bangunan Rumah Tinggal | Jl.Pertanian Payakumbuh |  | 1986 | 25.800.000 | 15.996.000 |
| 8 | Bangunan Gudang | Jl.Pertanian Payakumbuh |  | 1986 | 18.500.000 | 11.470.000 |
| 9 | Bangunan Kantor | Pangkalan Selatan Payakumbuh |  | 1995 | 50.460.000 | 22.202.400 |
| 10 | Bangunan Kantor | Desa Puah Datar , 50 Kota |  | 1995 | 40.960.000 | 18.022.400 |
| 11 | Bangunan Kantor | Desa Lima Kaum tanah Datar |  | 1995 | 76.270.000 | 33.558.800 |
| 12 | Bangunan Rumah Tinggal | Nagari Lima Kaum Tanah Datar |  | 1989 | 32.568.750 | 18.238.500 |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **387.188.750** | **194.785.300** |

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

1. **Aset Tetap Lainnya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Aset Tetap Lainnya | 60.693.500,00 | 366.684.500,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016.

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. -
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 60.693.500,00
   3. Appraisal 2011 Rp. -
   4. Apraisal 2012 Rp. -
   5. Apraisal 2013 Rp. -
   6. Apraisal 2015 Rp. -
   7. Appraisal 2016 Rp. -

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | | Penambahan | | Pengurangan | | Saldo Akhir |
| Aset Tetap Lainnya | 366.684.500,00 | | 59.295.500,00 | | 365.286.500,00 | | 60.693.500,00 |
| Akm Peny Aset Tetap Lainnya | - | |  | | - | |  |
| Nilai Buku | 366.684.500,00 | | 59.295.500,00 | | 365.286.500,00 | | 60.693.500,00 |
|  | **Saldo Audited 2016** | | |  | | **366.684.500,00** | |
|  | **Mutasi Tambah** | | |  | |  | |
|  | Hibah dari Kabupaten/Kota | | |  | | 59.295.500,00 | |
|  | **Mutasi Kurang** | | |  | |  | |
|  | Reklas ke Aset Gedung dan Bangunan | | |  | | 365.286.500,00 | |
|  | **Total Mutasi** | | |  | | **305.991.000,00** | |
|  | **Saldo per 31 Des 2017** | | |  | | **60.693.500,00** | |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

* Hibah dari Kabupaten/Kota senilai Rp.59.295.500,00 merupakan penambahan nilai aset tetap lainnya akibat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan adendum BAST P2D sehingga adanya pemindahan aset dari Kabupaten/Kota ke pusat (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)

**Penjelasan Mutasi Kurang**

* Reklasifikasi senilai Rp 365.286.500,00 yaitu ke Aset Gedung dan Bangunan karena gedung kantor UPTD KPHL sudah dihibahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga bangunan penunjang gedung kantor UPTD KPHL direklas kembali ke asset gedung dan bangunan yang terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Letak / Alamat** | **Luas (m2)** | **Tahun Perolehan** | **Nilai Perolehan** |
| 1 | Pembangunan pagar kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 222.826.000 |
| 2 | Pembangunan Sumur dan jaringan | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 19.965.000 |
| 3 | Pembangunan Pos Jaga Kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 36.000.000 |
| 4 | Pembangunan Garasi Kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 80.000.000 |
| 5 | Plang Nama Kantor UPTD KPHL | Jl. Raya Indarung, Cengkeh Padang | - | 2016 | 6.495.500 |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **365.286.500** |

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

1. **Konstruksi dalam Pengerjaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1. Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp 15.000.000,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.
2. Selama tahun 2017 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 15.000.000,00 | - | - | 15.000.000,00 |

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dinas Kehutanan senilai Rp 15.000.000,00 masih merupakan site plan tahun 2009, namun karena terjadi musibah gempa tahun 2010 yang menyebabkan banyaknya bangunan dan gedung SKPD di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami rusak berat dan jika dibandingkan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih termasuk rusak ringan, sehingga pembangunan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai site plan diatas tidak menjadi prioritas pembangunan sampai sekarang, disamping itu umur KDP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah lebih dari 5 tahun, sehingga jika pembangunannya dilanjutkan maka perencanaan pembangunannya tidak mengacu lagi kepada site plan yang menjadi KDP tersebut.

Rekapitulsi mutasi tambah dan kurang Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

1. **Akumulasi Penyusutan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Akumulasi Penyusutan | 23.958.711.643,32 | 7.499.151.382,61 |

Terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | 2017 | 2016 (Audited |
| Akum. Penyusutan Peralatan & Mesin | 20.345.389.167,97 | 4.949.774.874,42 |
| Akum. Penyusutan Gdg dan Bangunan | 3.613.322.475,35 | 2.549.376.508,19 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin | 4.949.774.874,42 | 15.395.614.293,55 |  | 20.345.389.167,97 |
| Akum. Penyusutan Gedung dan Bgn | 2.549.376.508,19 | 1.063.945.967,16 |  | 3.613.322.475,35 |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan | 7,499,151,382.61 | 16.459.560.260,71 |  | 23.958.711.643,32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Peralatan & Mesin** | **Gedung & Bangunan** |
| SALDO AKUM. PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 (AUDITED) | 4.949.774.874,42 | 2.549.376.508,19 |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH: |  |  |
| * + Hibah dr Pihak Ketiga | 11.945.706.600,98 | 616.406.694.,51 |
| * + Reklasifikasi | 0,00 | 194.785.300,00 |
| * + Koreksi + saldo awal | 0,00 | 7.571.930,00 |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG: | 0,00 | 0,00 |
| * BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017 | 3.449.907.692,57 | 245.182.042,65 |
| * SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 | 20.345.389.167,97 | 3.613.322.475,35 |

**Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan**

1. **Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan**
2. **Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**
3. Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp 11.945.706.600,98 terdiri dari :

* Hibah dari Kabupaten/Kota, akumulasi penyusutan senilai Rp11.771.461.600,98,- karena sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2017, aset dari pemerintah Kabupaten/Kota pindah ke aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
* Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp.246.730.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 174.245.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. BA.66/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/2017 Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp 246.730.000,- (daftar pada penjelasan mutasi tambah aset peralatan dan mesin)

1. Beban penyusutan aset peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar Rp3.449.907.692,57.
2. **Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**
3. Koreksi tambah nilai dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.571.930,00
4. Hibah dari Kabupaten/Kota dengan akumulasi penyusutan senilai Rp2.945.605.328,- karena sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2017, aset dari pemerintah Kabupaten/Kota pindah ke aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp585.000.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp35.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.7/Menlhk-Setjen/Rokum/Kap.3/2/2017 Tanggal 22 Februari 2017 yaitu bangunan gedung kantor seluas 225 m2 yang beralamat Jl. Raya Indarung Cengkeh Kec. Lubuk Kilangan Padang.
6. Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp 387.188.750,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp194.785.300,00.
7. Beban penyusutan aset gedung dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp245.182.042,65

**ASET LAINNYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Aset Tidak Berwujud | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Akum. Amortisasi Aset Tdk Berwujud | (6,000,000,00) | (6.000.000,00) |
| Aset Lain-Lain |  |  |
| * + - Aset Tidak Bermanfaat | - | - |
| * + - Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | 62.600.000,00 | 449.788.750,00 |
| Akum. Penys Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | (41.382.000,00) | (234.915.300,00) |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | **21.218.000,00** | **214.873.450,00** |

1. **Aset Tidak Berwujud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Aset Tidak Berwujud | 6.000.00,00 | 6.000.000,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 6.000.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Aset Tidak Berwujud | 6.000.000,00 | - | - | 6.000.000,00 |
| Akumulasi Amortisasi | (6.000.000,00) | - | - | (6.000.000,00) |
| Nilai Buku | - | - | - | - |

Selama tahun 2017 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset tidak berwujud.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

1. **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (6.000.000,00) | (6,000,000,00) |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Sebagaimana penjelasan uraian berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (6.000.000,00) | - | - | (6.000.000,00) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **Nilai** |
| SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2016 (Audited) | (6.000.000,00) |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | - |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG: | - |
| * BEBAN AMORTISASI TAHUN 2017 | - |
| * SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 17 | (6.000.000,00) |

1. **Aset Lain-Lain**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Aset Lain-Lain | 62.600.000,00 | 449.788.750,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Aset Tidak Bermanfaat | - | - | - | - |
| Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | 449.788.750,00 | - | 387.188.750,00 | 62.600.000,00 |

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 0 dan Aset Dipakai Pihak Lain senilai Rp 62.600.000,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1. **Aset Tidak Bermanfaat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Aset Tidak Bermanfaat | - | - |

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.0,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Aset Tidak Bermanfaat | 65.500.000,00 | - | - | 65.500.000,00 |
| Akum Penyusutan | 65.500.000,00 | - | - | 65.500.000,00 |
| Nilai Buku | - | - | - | - |

1. **Aset Dimanfaatkan Pihak Lain**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (audited)** |
| Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | 62.600.000,00 | 449.788.750,00 |

Dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp.62.600.000,00 dicatat berdasarkan nilai neraca awal 2005 Rp 62.600.000,- dengan mutasi sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | 449.788.750,00 | - | 387.188.750,00 | 62.600.000,00 |
| Akum Penyusutan | 234.915.300,00 | 1.252.000,00 | 194.785.300,00 | 41.382.000,00 |
| Nilai Buku | 214.873.450,00 | 1.252.000,00 | 192.403.450,00 | 21.218.000,00 |

Selama tahun 2017 hanya terdapat mutasi kurang terhadap aset dimanfaatkan pihak lain.

**Penjelasan Mutasi Kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain :**

* Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp 387.188.750,00 ke aset gedung dan bangunan yaitu berupa bangunan yang berada di Kabupaten/Kota yang semula merupakan aset yang dipakai oleh pihak lain namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 dimana sudah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas di masing-masing kabupaten/kota maka bangunan tersebut yang memakai tahun 2017 adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Letak / Alamat** | **Luas (m2)** | **Tahun Perole- han** | **Nilai Perolehan** | **Akumulasi Penyusutan** |
| 1 | Bangunan Kantor | Desa Silaut Kab. Pesisir Selatan | - | 1995 | 23.950.000 | 10.538.000 |
| 2 | Bangunan Rumah Tinggal | Desa Api-Api Kec. Bayang Pesisir Selatan | - | 1984 | 24.200.000 | 11.132.000 |
| 3 | Bangunan Rumah Tinggal | Jl. Raya Sago Pesisir Selatan | - | 1984 | 25.900.000 | 11.914..000 |
| 4 | Bangunan Kantor | Alang Rambah Pesisir Selatan | - | 1995 | 4.480.000 | 1.971.200 |
| 5 | Bangunan Kantor | Jl. Pertanian Labuh Silang Payakumbuh | - | 1986 | 32.300.000 | 20.026.000 |
| 6 | Bangunan Kantor | Jl.Pertanian Payakumbuh Barat |  | 1986 | 31.800.000 | 19.716.000 |
| 7 | Bangunan Rumah Tinggal | Jl.Pertanian Payakumbuh |  | 1986 | 25.800.000 | 15.996.000 |
| 8 | Bangunan Gudang | Jl.Pertanian Payakumbuh |  | 1986 | 18.500.000 | 11.470.000 |
| 9 | Bangunan Kantor | Pangkalan Selatan Payakumbuh |  | 1995 | 50.460.000 | 22.202.400 |
| 10 | Bangunan Kantor | Desa Puah Datar , 50 Kota |  | 1995 | 40.960.000 | 18.022.400 |
| 11 | Bangunan Kantor | Desa Lima Kaum tanah Datar |  | 1995 | 76.270.000 | 33.558.800 |
| 12 | Bangunan Rumah Tinggal | Nagari Lima Kaum Tanah Datar |  | 1989 | 32.568.750 | 18.238.500 |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **387.188.750** | **194.785.300** |

**Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain :**

* Beban penyusutan tahun 2017 sebesar Rp 1.252.000,00

**Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain:**

* Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp 387.188.750,00 ke aset gedung dan bangunan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp194.785.300,00

Rekaptulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 18

**KEWAJIBAN**

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Kewajiban Jangka Pendek | 1.443.345.889,00 | 417.676.623,00 |

1. **Utang Belanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Utang Belanja | 1.443.345.889,00 | 417.676.623,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2017 dan 2016. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

* **Utang belanja pegawai Rp 1.419.726.468,-**

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November 2017 sebesar Rp709.863.234,00 dan bulan Desember 2017 sebesar Rp709.863.234,00. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2015 tgl Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Utang Belanja Pegawai | 404.960.987,00 | 1.419.726.468,00 | 404.960.987,00 | 1.419.726.468,00 |

Penambahan sebesar Rp 1.419.726.468,00 adalah utang belanja pegawai yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan November 2017 senilai Rp709.863.234,00 dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Desember 2017 sebesar Rp 709.863.234,00.

Pengurangan utang belanja pegawai senilai Rp 404.960.987,00 adalah pelunasan utang belanja pegawai/belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2016

* **Utang belanja barang dan Jasa Rp 23.619.421,00.**

Yaitu utang belanja telp, air, listrik dan fax/internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Utang Belanja Brg dan Jasa | 12.715.636,00 | 23.619.421,00 | 12.715.636,00 | 23.619.421,00 |

Penambahan sebesar Rp 23.619.421,00 adalah utang belanja telp, air, listrik dan fax/internet tahun 2017 terdiri dari belanja telp Rp 428.037,- belanja air Rp 1.171.700,- belanja listrik Rp 11.026.312,- dan belanja fax Rp 414.240,-.

Pengurangan sebesar Rp 12.715.636.00 adalah pelunasan utang belanja telp, air, listrik dan fax/internet tahun 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

**EKUITAS**

1. **Ekuitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016 (Audited)** |
| Ekuitas | 50.045.891.747,35 | 42.238.929.381,57 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016. Ekuitas ini terdiri dari:

* Ekuitas 42.238.929.381,57
* Surplus/Defisit LO (63.102.547.813,22)
* Perubahan SAL 60.269.701.334,00
* Surplus/Defisit LRA (60.269.701.334,00)
* RK/PPKD 60.269.701.334,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

**5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

**5.3.1 PENDAPATAN-LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Pendapatan-LO | 42.359.746,00 | 48.490.008,00 |

1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2017 dan Tahun 2016. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, maka terdapat penurunan sebesar Rp.6.130.262,-

Pendapatan ini terdiri dari:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 42.359.746,00 | 48.490.008,00 |

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Pendapatan LRA/LO** | **Pendapatan-LRA** | **Pendapatan-LO** | **Selisih +/-** |
| * Pendapatan Retribusi Daerah | 42.359.746,00 | 42.359.746,00 | - |

**5.3.2 BEBAN**

**Beban Operasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Beban Pegawai | 42.899.105.031,00 | 10.572.981.282,00 |
| Beban Barang dan Jasa | 16.541.888.863,00 | 8.063.985.182,00 |
| Beban Penyusutan dan Amosrtisasi | 3.703.913.665,22 | 1.297.891.825,33 |
| **Beban Operasi-LO** | **63.144.907.559,22** | **19.934.858.289,33** |

* 1. **Beban Pegawai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Beban Pegawai | 42.899.105.031,00 | 10.572.981.282,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Beban Gaji dan Tunjangan – LO | 33,787,406,280.00 | 8.149.217.355,00 |
| Gaji Pokok PNS/uang Representasi – LO | 26,967,999,900.00 | 6.521.233.100,00 |
| Tunjangan Keluarga – LO | 2,508,863,676.00 | 590.149.424,00 |
| Tunjangan Jabatan – LO | 301,920,000.00 | 301.090.000,00 |
| Tunjangan Fungsional – LO | 1,781,360,000.00 | 155.220.000,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum – LO | 768,615,000.00 | 206.230.000,00 |
| Tunjangan Beras – LO | 1,421,314,920.00 | 335.304.600,00 |
| Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus – LO | 36,985,301.00 | 39.901.164,00 |
| Pembulatan Gaji – LO | 347,483.00 | 89.067,00 |
| Tambahan Pengh. Berdasarkan Beban Kerja – LO | 9,111,698,751.00 | 2.423.763.927,00 |
| **JUMLAH BEBAN PEGAWAI – LO** | **42,899,105,031.00** | **10.572.981.282,00** |

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto, serta ada pengembalian beban pegawai selama tahun 2017 yaitu senilai Rp5.442.938,00 yang merupakan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan bulan Oktober 2017 An. Sunardi sebesar Rp 5.442.938,00 dengan perincian sebagai berikut : Gaji pokok PNS-LO sebesar Rp4.568.800, tunjangan fungsional-LO sebesar Rp780.000, tunjangan beras-LO sebesar Rp72.420, tunjangan PPh-LO sebesar Rp 21.658,00 dan pembulatan gaji-LO sebesar Rp 60,00.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Pegawai LRA** | **Beban Pegawai LO** | **Selisih +/-** |
| * Gaji dan tunjangan | 33.787.406.280,00 | 33.787.406.280,00 | - |
| * Tambahan Penghasilan PNS | 8.097.214.344,00 | 9,111,698,751.00 | 1.014.484.407,00 |
| Jumlah | 41.884.620.624,00 | 42.899.105.031,00 | 1.014.484.407,00 |

Penjelasan selisih:

1. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov 2017 sebesar Rp.709.863.234,00 dan bulan Desember 2017 sebesar Rp 709.863.234,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2017 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Januari dan Februari 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2017.
   1. **Beban Barang & Jasa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Beban Barang dan Jasa | 16.541.888.863,00 | 8.063.985.182,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **2017** | **2016** |
| **Beban Barang dan Jasa** | **16.541.888.863,00** | **8.063.985.182,00** |
| **Beban Bahan Pakai Habis** | **1.012.545.600.00** | **469,195,435.00** |
| Beban Persediaan alat tulis kantor | 293.043.500,00 | 120.589.920,00 |
| Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 33.831.500,00 | 10.499.225,00 |
| Beban Persediaan perangko, materai danbenda pos lainnya | 36.855.000,00 | 8.181.000,00 |
| Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 294.892.550,00 | 129.879.550,00 |
| Beban Seminar Kit Peserta | 35.775.000.00 | 14,375,000.00 |
| Beban peralatan/perlengkapan pakai habis | 185,670,750.00 | 185,670,750.00 |
| **Beban Persediaan Bahan/ Material** | **769.631.050,00** | **962.703.250,00** |
| Beban Persediaan bahan baku bangunan | 157.336.650,00 | 215.468.000,00 |
| Beban Persediaan bahan/bibit tanaman | 571.731.100,00 | 663.336.350,00 |
| Beban Persediaan bahan obat-obatan | 7.678.000,00 | 1.400.000,00 |
| Beban Persediaan bahan kimia | 19.075.300,00 | 79.543.900,00 |
| Beban Bahan Percontohan/Promosi | 13.810.000,00 | 2.955.000,00 |
| Beban Jasa Kantor | 1.078.558.446,00 | 367.864.215,00 |
| Beban Jasa telepon | 26.994.517,00 | 7.747.594,00 |
| Beban Jasa air | 26.213.450,00 | 15.525.050,00 |
| Beban Jasa listrik | 168.593.926,00 | 115.618.977,00 |
| Beban Jasa surat kabar/majalah | 10.704.000,00 | 10.958.000,00 |
| Beban Jasa kawat/faksimili/internet | 82.188.180,00 | 61.672.271,00 |
| Beban Jasa paket/pengiriman | - | 120.000,00 |
| Beban Jasa Sertifikasi | 45.600.000,00 | - |
| Belanja Jasa Laboratorium | 29.670.000,00 | - |
| Beban Jasa Publikasi | 8.500.000,00 | 400.000,00 |
| Beban jasa akomodasi | 92.508.000,00 | 29.793.000,00 |
| Beban pajak bumi dan bangunan | 989.323,00 | 989.323,00 |
| Beban Transportasi | 586.597.050,00 | 125.040.000,00 |
| **Beban Premi Asuransi** | **25.757.050,00** | - |
| Beban Jasa Premi Asuransi BMD | 25.757.050,00 | - |
| **Beban Perawatan Kendaraan Bermotor** | **266.059.127,00** | **140.576.206,00** |
| Beban Jasa Service | 23.509.082,00 | 26.462.289,00 |
| Beban Penggantian Suku Cadang | 112.381.407,00 | 65.333.427,00 |
| Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 74.375.808,00 | 33.774.900,00 |
| Beban Jasa Kir | 491.200,00 |  |
| Beban Pajak Kendaraan Bermotor | 55.301.630,00 | 15.005.590,00 |
| **Beban Cetak dan Penggandaan** | **399.065.000,00** | **199.717.200,00** |
| Beban Cetak | 192.966.000,00 | 93.938.500,00 |
| Beban Penggandaan | 206.099.000,00 | 105.778.700,00 |
| **Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir** | **73.634.000,00** | **27.500.000,00** |
| Beban sewa gedung/ kantor/tempat | 67.135.000,00 | 25.000.000,00 |
| Beban sewa ruang rapat/pertemuan | 6.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| **Beban Sewa Sarana Mobilitas** | **15.300.000,00** | **750.000,00** |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat | 15.300.000,00 | - |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas Air | - | 750.000,00 |
| **Beban Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor** | **14.500.000,00** | **10.000.000,00** |
| Beban sewa taman/bunga untuk taman hias | 14.500.000,00 | 5.000.000,00 |
| Beban sewa bandwidth | - | 5,000,000.00 |
| **Beban Makanan dan Minuman** | **796.676.000,00** | **168.476.000,00** |
| Beban makanan dan minuman harian pegawai | 5.760.000,00 | 14.592.000 |
| Beban makanan dan minuman rapat | 129.468.000,00 | 30.770.000,00 |
| Beban makanan dan minuman pelatihan | 661.448.000,00 | 123.114.000 |
| **Beban Pakaian Dinas dan Atributnya** | **264.069.000,00** | **82.852.000,00** |
| Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 264.069.000,00 | 82.852.000,00 |
| **Belanja Pakaian Kerja** | **146.387.500,00** | **17.650.000,00** |
| Beban pakaian kerja lapangan | 146.387.500,00 | 17.650.000,00 |
| **Beban Perjalanan Dinas** | **7.891.631.349,00** | **2.642.706.751,00** |
| Beban perjalanan dinas dalam daerah | 6.783.079.500,00 | 2.293.623.970,00 |
| Beban perjalanan dinas luar daerah | 1.036.567.918,00 | 349.082.781,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri | 71.983.931,00 | - |
| **Beban Pemeliharaan** | **291.031.000,00** | **331.910.600,00** |
| Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin | 56.630.000,00 | 72.181.000,00 |
| Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan | 234.401.000,00 | 259.729.600,00 |
| **Beban kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS** | **11.360.000,00** | **4.500.000,00** |
| Beban bimbingan teknis | 11.360.000,00 | - |
| Beban kursus-kursus singkat/pelatihan | - | 4.500.000,00 |
| **Honorarium PNS** | **670.040.000,00** | **231.880.000,00** |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber- LO | 335.790.000,00 | 27.850.000,00 |
| Honorarium Pengelola Keuangan Daerah – LO | 239.250.000,00 | 150.030.000,00 |
| Honorarium Pengelola SIPKD – LO | 23.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| Honorarium Pengelola Aset Daerah-LO | 33.600.000,00 | 25.200.000,00 |
| Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD – LO | 14.400.000,00 | 4.800.000,00 |
| Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD – LO | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **Beban Honorarium Non PNS** | **2.330.968.458,00** | **911.672.725,00** |
| Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO | 10.000.000,00 | 42.650.000,00 |
| Beban Jasa Moderator | 30.500.000,00 | 9.000.000,00 |
| Beban Jasa Pengawas | - | 14.400.000,00 |
| Beban Jasa Buruh/Tukang/Mandor | 892.138.900,00 | 706.220.000,00 |
| Beban Jaa Pembuat Peta (Manual/Tematik/Digital) | 74.080.000,00 | 13.280.000,00 |
| Beban Jasa MC/Pembawa Acara | 3.300.000,00 | 750.000,00 |
| Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an | 3.900.000,00 | 3.600.000,00 |
| Beban Jasa Sopir | 28.081.034,00 | 25.152.725,00 |
| Beban Jasa Peliputan | - |  |
| Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Beban Jasa Petugas Lapangan | 668.800.000,00 | 10.800.000,00 |
| Beban Jasa Pengelola SIMBANGDA-LO | - | 2.000.000,00 |
| Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap – LO | 107.23.600,00 | 66.820.000,00 |
| Honorarium Pengelola SIPKD – LO | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| **Beban Jasa Lembaga** | **247.401.783,00** | **232.496.800,00** |
| Beban jasa lembaga sertifikasi | 30.800.000,00 | 16.500.000,00 |
| Beban jasa lembaga pengamanan | 216.601.783,00 | 215.996.800,00 |
| Beban Kontribusi | 3.500.000,00 | - |
| Beban Kontribusi Pelatihan/Magang | 3.500.000,00 | - |
| **Beban Jasa Lainnya** | **233.772.500,00** | **1.254.534.000,00** |
| Beban Jasa Cleaning Service | 233.772.500,00 | 210.445.000,00 |
| **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **3.703.913.665,22** | **1.297.891.825,33** |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 3.449.907.692,57 | 1.148.607.760,15 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 252.753.972,65 | 140.288.290,18 |
| **Beban Penyusutan Aset Lainnya** | **1.252.000,00** | **8.995.775,00** |
| Beban Penyusutan Aset Dimanfaatkan PihakLaiin | 1.252.00000 | 8.995.775,00 |
| **JUMLAH BEBAN** | **63.144.907.559,22** | **19.934.858.289,33** |

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, serta tidak ada pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2017.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Brg&Jasa LRA** | **Beban Brg&Jasa LO** | **Selisih +/-** |
| * Belanja Bahan Pakai Habis | 1.059.375.450,00 | 1.012.545.600,00 | 46.829.850,00 |
| * Blj Bahan/Material | 769.631.050,00 | 769.631.050,00 | - |
| * Belanja Jasa Kantor | 1.067.979.314,00 | 1.078.558.446,00 | (10.579.132,00) |
| * Beban Premi Asuransi | 28.098.600,00 | 25.757.050,00 | 2.341.550,00 |
| * Belanja Perawatan Kendaraan Bermtr | 263.935.952,00 | 266.059.127,00 | (2.123.175,00) |
| * Belanja Cetak dan Penggandaan | 423.269.000,00 | 399.065.000,00 | 24.204.000,00 |
| * Belanja Sewa Rumah/Gedung/ | 73.635.000,00 | 73.635.000,00 | - |
| * Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | - |
| * Belanja Sewa Perlkp & Peralatan Kantor | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | - |
| * Belanja Makanan dan Minuman | 796.676.000,00 | 796.676.000,00 | - |
| * Belanja Pakaian Dinas & Atributnya | 264.069.000,00 | 264.069.000,00 | - |
| * Blj Pakaian Kerja | 146.37.500,00 | 146.37.500,00 | - |
| * Blj Perjalanan Dinas | 7.891.631.349,00 | 7.891.631.349,00 | - |
| * Blj Pemeliharaan | 291.031.000,00 | 291.031.000,00 | - |
| * Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi | 11.360.000,00 | 11.360.000,00 | - |
| * Belanja Jasa Lembaga | 247.401.783,00 | 247.401.783,00 | - |
| * Honorarium PNS | 670.040.000,00 | 670.040.000,00 | - |
| * Honorarium Non PNS | 2.330.968.458,00 | 2.330.968.458,00 | - |
| * Belanja Kontribusi | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | - |
| * Belanja Jasa Lainnya | 233.772.500,00 | 233.772.500,00 | - |
| **Jumlah** | **16.602.561.956,00** | **16.541.888.863,00** | **60.673.093,00** |

Penjelasan selisih:

* + - Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Belanja Bahan Pakai Habis | 60.032.250,00 |  | 25.798.750,00 | 39.001.150,00 | 46.829.850,00 |  |
| * Blj Bahan/ Material | 35.700.549,00 |  |  | 35.700.549,00 | - |  |
| * Blj Cetak & Penggandaan | 66.293.300,00 |  |  | 42.089.300,00 | 24.204.000 |  |
| Jumlah | 162.026,099,00 |  | 25.798.750,00 | 116.790.999,00 | 73.375.400.00 |  |

* + - Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2017 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember 2017 yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Belanja Telepon | 428.037,00 |  |  | 2.344.067,00 |  | 1.916.030,00 |
| * Belanja Listrik | 11.026.312,00 |  |  | 16.057.879,00 |  | 5.031.567,00 |
| * Belanja Air | 1.171.700,00 |  |  | 2.359.700,00 |  | 1.188.000,00 |
| * Belanja Jasa Kawat/Faksimili/ Internet | 414.240,00 |  |  | 2.857.775,00 |  | 2.443.535,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah | 13.040.289 |  |  | 23.619.421,00 |  | 10.579.132,00 |

* Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Belanja Premi Asuransi BMD | 16.390.850,00 |  |  | 14.049.300,00 | 2.341.550,00 |  |

* Penyesuaian Beban Pajak Kendaraan Bermotor/ Beban Dibayar Dimuka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Belanja Pajak Kendaraan Bermotor |  | 2.123.3175,00 |  |  |  | 2.123.175,00 |

* 1. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 3.703.913.665,22 | 1.297.891.825,33 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban PenyusutanTahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

* + - Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 3.449.907.692,57
    - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 252.753.972,65
    - Beban Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain 1.252.000,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 29. (2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2017

* 1. **PENJELASANLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| Ekuitas Akhir | 50.045.891.747,35 | 42.238.929.381,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ekuitas Awal** |  | **42.238.929.381,57** |
| **2** | **Surplus/Defisit LO** |  | **(63.102.547.813,22)** |
| **3** | **RK PPKD** |  | **60.269.701.334,00** |
| **4** | **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar** |  | **10.639.808.845,00** |
|  | * Koreksi Utang Tahun Lalu | (605.727,00) |  |
|  | * Mutasi Tambah Aset Tetap/Aset Lainnya | 23.542.785.296,08 |  |
|  | * Mutasi kurang aset tetap/aset lainnya | (12.902.370.723,48) |  |
| **5** | **Ekuitas Akhir** |  | **50.045.891.747,35** |

**Penjelasannya adalah sebagai berikut:**

1. Ekuitas Awal sebesar Rp 42.238.929.381,57 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca (audited) per 31 Des 2016.
2. Surplus/Defisit LO sebesar (Rp. 63.102.547.813,22) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2017
3. RK PPKD sebesar Rp60.269.701.334,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, yaitu :

* Koreksi Utang Tahun Lalu senilai Rp 605.727,-, yaitu selisih pelunasan utang belanja telp, listrik dan fax tahun 2016 sebesar Rp 324.653,00 dan selisih pelunasan utang belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp 281.074,00
* Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp 23.542.785.296,09 terdiri atas :

****

* Mutasi kurang Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp 12.902.370.723,49 terdiri atas :



1. Ekuitas Akhir sebesar Rp 50.045.891.747,95 adalah saldo Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017.
   1. **Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Pendapatan/ Belanja | LRA | LO | Selisih |
| Pendapatan Daerah | **48.490.008,00** | **48.490.008,00** | **-** |
| * Pendapatan Pajak |  |  |  |
| * Pendapatan Retribusi | 42.359.746,00 | 42.359.746,00 | - |
| * Lain-lain PAD Yg Sah |  |  |  |
| Jumlah Pendapatan |  |  |  |
| Belanja Operasi |  |  |  |
| * Belanja Pegawai | 41.884.620.624,00 | 42.899.105.031,00 | (1.014.484.407,00) |
| * Belanja Brg & Jasa | 16.602.561.956,00 | 16.541.888.863,00 | 60.673.093,00 |
| * Belanja Modal | 1.824.878.500,00 |  | 1.824.878.500,00 |
| * Beban Penyusutan & Amortisasi |  | 3.703.913.665,22 | (3.703.913.665,22) |
| * Beban Penyisihan Piutang |  |  |  |
| Jumlah Beban Operasi | **60.312.061.080,00** | **63.144.907.559,22** | **(2.832.846.479,22)** |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**6.1 Struktur Organisasi**

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di Bidang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Bidang (UPTD) (sesuai surat Kementerian Dalam Negeri RI No.061/4336/UTI.A tanggal 12 Juni 2017 yaitu:

a. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Yozarwardi UP, S.Hut, M.Si)

* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Suyatno, B.Sc)
* Sub Bagian Keuangan (Purnama, B.Sc)
* Sub Bagian Program (Ita Rahmawati, S.Hut, MM)

1. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE (Faridil Afarasy, S.Hut, MM)

* Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan (Yanuar Bachril, SH, M.Si)
* Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dudi Badrudin, S.Hut)
* Seksi Perlindungan Hutan (Novi Hendri, S.Hut, M.Si)

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan (Ir. MGO Senatung, MP)

* Seksi Perencanaan dan Tata Hutan (Sayogo Hutomo, S.Hut, MP)
* Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si)
* Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan (Adrianto, SH, M.Si)

1. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ir. Ruswin Rustam)
   * Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Zarmawandi, S.Hut)
   * Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ir. Saida R. Nauli)
   * Seksi Pengendalian Perubahan Iklim (Afrial Muhammad, Spt, M.Si)
2. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat (Yonefis,SH, MM)
   * Seksi Penyuluhan (Rini Hasmira, SH)
   * Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kusworo, SP, M.Si)
   * Seksi Hutan Adat dan Kemitraan (Tito Trio Putra, S.Hut(
3. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan (Febrina Tri Susila Putri, SP, M.Si)

* Subbagian Tata Usaha (Fazlul Taufik, ST, M.Eng)
* Seksi Pengembangan Sumber Benih (Era Sulastri, S.Hut, M.Si)
* Seksi Informasi dan Peredaran Benih (Imran, SE)

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan (Ir. Eka Meinarsih)

* Subbagian Tata Usaha (Boy Martin, SH, M.Si)
* Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Hendra Bakti Putra, S.Hut)
* Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat (Cucu Sukarna, S.Ip)

1. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasaman Raya (KPHL Pasaman Raya)
2. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Limapuluh Kota (KPHL Lima Puluh Kota)
3. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Agam Raya (KPHL Agam Raya)
4. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Bukit Barisan
5. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Sijunjung (KPHL Sijunjung)
6. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Solok (KPHL Solok)
7. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Batanghari (KPHL Batang Hari)
8. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Dharmasraya (KPHP Dharmasraya)
9. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pesisir Selatan (KPHP Pesisir Selatan)
10. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Mentawai (KPHP Mentawai)

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 875/3837/Sekr-2017 Tanggal 2 Oktober 2017

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun pembangunan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu Pelayanan, Pengawasan dan Regulasi sebagaimanan tercantum dalam kewenangan di bidang Kehutanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**6.2 Komposisi Pegawai**

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat sttruktural dan fungsional pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai

Secara keseluruhan personil yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah 529 orang yang terdiri dari :

* 526 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil
* 3 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- S2 : 37 orang

- S1 : 199 orang

- D3 : 25 orang

- SLTA : 262 orang

- SLTP : 6 orang

1. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- Golongan IV : 26 orang

- Golongan III : 415 orang

- Golongan II : 68 orang

- Golongan I : 5 orang

1. Jumlah Pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

* Pejabat Struktural

Eselon II : 1 orang

Eselon III : 7 orang

Eselon IV : 21 orang

* Pejabat Fungsional : 204 orang

**BAB VII**

**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna dalam arti belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 juga memperhatikan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si**

**NIP. 19581029 198703 1 003**